

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANG ACEH DARI MASA EXPEDISI SAMPAI
MASA KEKERASAN
1873-1896**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1
Kependidikan**



Disusun Oleh :

HENU SITORESMI

93 1314 0005
93005112060412005

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1999**

HALAMAN PENGESAHAN

PERANG ACEH DARI MASA EXPEDISI
SAMPAI MASA KEKERASAN
1873 -1896

Disusun Oleh :

Henu Sitoesmi

93 1314 005

93 0051120604120005

Telah disetujui oleh :

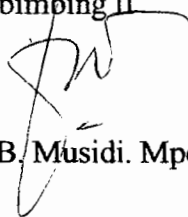
I. Pembimbing I,



(DRS. A. K. Wiharyanto)

tgl. 13 April, 1999.

II. Pembimbing II



(DRS. B. Musidi. Mpd)

tgl. 13 April, 1999.

**PERANG ACEH DARI MASA EXPEDISI SAMPAI
MASA KEKERASAN
1873 - 1896**

SKRIPSI

Disusun dan dipersiapkan oleh :

Henu Sitoresmi

93 1314 005

930051120604120005

Telah dipertahankan di depan panitia penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 1999 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 Kependidikan

Susunan Panitia Penguji :

Ketua : DRS. A. K. Wiharyanto

Sekretaris : DRS. B. Musidi, MPd

Anggota : 1. DRS. A. K. Wiharyanto

2. DRS. B. Musidi, MPd

3. DRS. JBM. Mudjihardjo

Yogyakarta, 15 April, 1999.

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
Dekan,**



(Dr. Paul Suparno, S. J., M.S.T.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.

(Korintus II : 9 : 6)

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu ; carilah maka kamu akan mendapati ; ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.

(Mateus 7 : 7)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak & Ibuku tercinta Yohanes Sugeng Rahardjo, sebagai hadiah ulang tahun perkawinan ke-25.
2. Bapak & ibu Yoseph Subartono, yang telah membantu dengan doa dari jauh.
3. Seseorang yang telah sabar dan setia membantu sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Mbak Eny dan Mbak Indra sekeluarga serta adik-adikku (Pragi, Agung, Elly, Didik, Koko, dan sikecil Randu).
5. Teman-teman Sejarah Angkatan "93".

ABSTRAK

Henu Sitoesmi : *Perang Aceh Dari Masa Expedisi Sampai Masa Kekerasan 1873 - 1896. Skripsi*. Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma. 1999.

Penelitian ini mendeskripsikan keadaan masyarakat Aceh sebelum perang, latar belakang terjadinya perang Aceh, serta jalannya perang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menghasilkan suatu temuan bahwa keadaan masyarakat Aceh sebelum perang merupakan wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Struktur masyarakat Aceh digolongkan menjadi tiga yaitu golongan keluarga Raja, golongan Bangsawan, dan golongan rakyat biasa. Struktur pemerintahan dibagi menjadi empat yaitu Gampong, Mukim, Nangroe, dan Sagoe.

Perang terjadi karena Belanda melanggar ketentuan Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871, dengan memaksa Aceh mengakui kedaulatan Belanda, tetapi karena ditolak Belanda menyerang Aceh.

Belanda menyerang Aceh dengan mengirimkan pasukan, pembuatan benteng-benteng, lalu melakukan siasat *divide et impera*. Aceh mempergunakan perang gerilya dan melancarkan siasat penghianatan (misal Teuku Umar).

Pada tahun 1896, Belanda berusaha menguasai Aceh, dan pada tahun 1904 perang Aceh secara resmi berakhir.

ABSTRACT

Henu Sitoresmi : *The Aceh War From Expedition Era to Violence Era 1873 - 1896. Skripsi.* Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma. 1999.

This research was intended to describe the condition of Aceh people before the war, the background of the war and the course of the war. This research is a library research.

The results are the research that the condition of Aceh society before the war is the King's region which was lead by Sultan. The Aceh societie's structure are three class the king's family, the nobles and the common people. The government structure is divided into four : Gampong, Mukim, Nangroe, and Sagoe.

The war happened because Dutch against London Treaty (1824) and Sumatera Treaty (1871), by forcing Aceh recoqnized the sovereignty of Dutch, but Aceh denided, and by Dutch attacked Aceh.

Dutch attacked of Aceh by sending the troops which, by building the fortress and then applied the devide et impera strategy. Aceh used guerrilla and collaboration (such as Teuku Umar).

In 1896, Dutch was still continuing their efforts to shatter Aceh, and Aceh war formally in 1904.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah bapa Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, atas segala berkat dan penyertaan-Nya dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini dengan judul “Perang Aceh dari Masa Expedisi sampai kekerasan 1873 - 1896.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, dan nasehat dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini kami haturkan kepada :

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. DRS. A. K. Wiharyanto, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan hingga terselesaikannya karya tulis ini.
4. DRS. B. Musidi, MPd, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran-saran.
5. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga ini dapat memberikan manfaat lebih bagi para pembaca.

Yogyakarta

Penulis



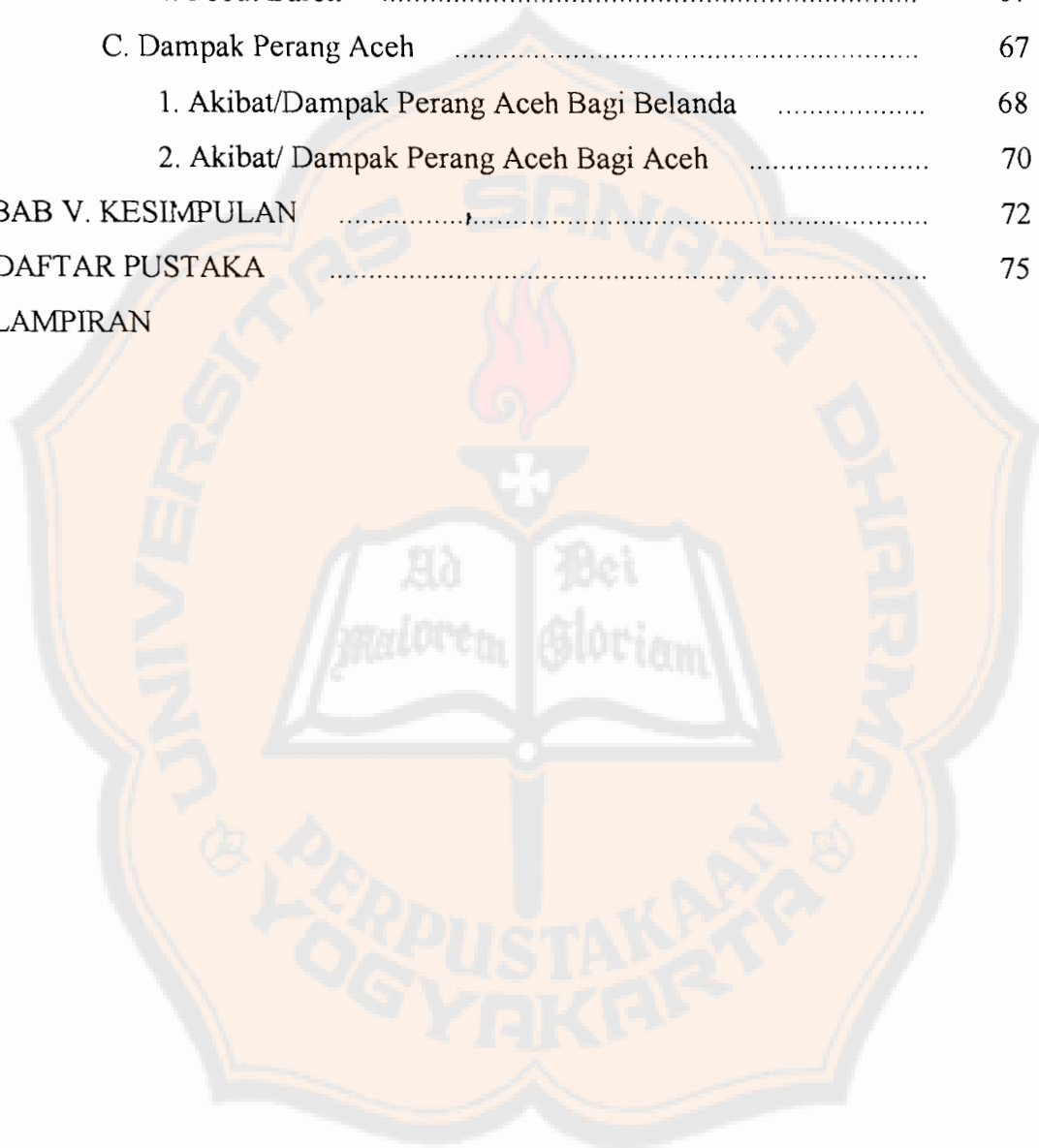
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan/manfaat penelitian	12
E. Tinjauan Penelitian	13
F. Metode Penelitian	15
BAB II. KEADAAN MASYARAKAT ACEH SEBELUM PERANG	
A. Sekilas Tentang Kesultanan Aceh	19
B. Struktur Masyarakat Aceh Sebelum Pendudukan Belanda ..	20
C. Sistim Pemerintahan	26
BAB III. LATAR BELAKANG PERANG ACEH	
A. Traktat London tahun 1824.....	35
B. Traktat Sumatera tahun 1871	39
C. Usaha Belanda Menduduki Aceh	43
D. Faktor Penyebab Terjadinya Perang Aceh	49
BAB IV. JALANNYA PERANG ACEH	
A. Strategi Perang Aceh	52
1. Strategi Perang dari Pihak Belanda	53
2. Strategi Perang Dari Pihak Aceh	59
B. Peranan Wanita Dalam Perang Aceh	62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Cut Nyak Dien	62
2. Cut Mutia	64
3. Teuku Fatimah	65
4. Pocut Baren	67
C. Dampak Perang Aceh	67
1. Akibat/Dampak Perang Aceh Bagi Belanda	68
2. Akibat/ Dampak Perang Aceh Bagi Aceh	70
BAB V. KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam abad XVII bahkan sebelumnya sudah muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, di antaranya kesultanan Aceh. Setelah tahun 1602 kesultanan-kesultanan tersebut satu-satu persatu jatuh ke tangan VOC yang kemudian menjadi pemerintahan Hindia Belanda dan terciptalah Pax Neerlandica (G. Moedjanto, 1989 : 16).

Bagi kerajaan Aceh sebenarnya kedatangan Belanda tidak berdampak secara langsung, tetapi setelah terjadi persetujuan antara Belanda dengan Inggris pada tahun 1871 kerajaan Aceh mulai khawatir, hal ini disebabkan dalam persetujuan tersebut dicapai suatu kesepakatan yang disebut “Traktat Sumatera” yang berisi kebebasan yang diberikan kepada bangsa Belanda untuk mengadakan perluasan kekuasaannya di seluruh Sumatera, termasuk ke Aceh yang selama ini tidak boleh diganggu kedaulatannya. Selain itu dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 menambah pentingnya posisi Aceh di kawasan Asia. Dengan demikian Aceh merupakan pintu gerbang dalam lalu lintas pelayaran di selat Malaka, sehingga keinginan Belanda untuk menguasai Aceh semakin besar (Marwati Djoned, 1993 : 241-242). Sejak saat itulah timbul perselisihan antara Aceh dengan Belanda, karena keberadaan Belanda yang mulai mengusik kedamaian rakyat Aceh. Perselisihan antara Aceh dengan Belanda akhirnya menimbulkan konflik/peperangan yang

memakan waktu cukup lama yaitu antara tahun 1873 sampai 1903. Di antaranya berbagai perlawanan yang pernah muncul untuk melawan pihak kolonialis, Acehlah yang dianggap lawan paling tangguh, bahkan sampai kedatangan Jepang 1942 sebenarnya masih terjadi perlawanan melawan Belanda di daerah Aceh.

Rakyat Aceh berjiwa prajurit yang gagah berani dalam mempertahankan kemerdekaannya dalam segala bentuk, walau mereka hanya bersenjatakan pedang, lembing, rencong, dan bambu runcing, selain itu juga dan beberapa senjata modern seperti senapan dan meriam (T. Syamsudin, 1980 : 129). Di samping itu rakyat Aceh juga memiliki cinta yang sangat besar terhadap agama dan kemerdekaan sehingga selalu mewarnai dan menjiwai kehidupan masyarakat Aceh. Inilah yang mendorong rakyat Aceh dalam menentang setiap usaha dari kaum kolonialis Belanda yang berusaha menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di tanah Aceh.

Dengan berbagai usaha untuk mempertahankan diri dari imperialisme Belanda, Aceh juga mengadakan hubungan diplomatik dengan pihak luar negeri. Hal ini dititikberatkan pada usaha untuk mencari dukungan politik dan juga bantuan senjata. Di antara negara yang menjadi perhatian utama adalah Turki bahkan hubungan diplomatik di antara keduanya sudah ada sejak pertengahan abad XVII (Depdikbud, 1978 : 122-123). Bukti adanya hubungan diplomatik antara Rakyat Aceh dengan Turki yaitu dengan

dikirimnya utusan Aceh ke Turki oleh Habib Abdulrachman al-zahn pada tahun 1873 (Marwati Djoned, 1993 : 243).

Pada tahun yang sama, Aceh juga mengadakan perundingan-perundingan rahasia dengan konsul jendral Amerika yang bernama Mayor Jendral AG. Studer, di Singapura dengan mengutus Tengku Panglima Muh-Tibang. Bahkan telah dibicarakan konsep perjanjian persahabatan dengan utusan Aceh. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari menteri luar negeri Amerika yaitu Mr. Hamilton Fish yang mengemukakan mengenai situasi Aceh (Ismail Suny, 1980 : 37).

Dengan adanya keterlibatan beberapa negara lain, ternyata hal tersebut mengkhawatirkan pihak Belanda. Untuk itu Belanda mengirimkan surat kepada sultan Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh. Tentu saja permintaan Belanda itu ditolak oleh Sultan, sehingga terjadilah penyerangan terhadap Aceh. Perang itu telah dimulai dari seberang Selat Malaka dengan intrik-intrik pemalsuan surat serta kurir-kurir rahasia seperti perang di Perak. Perak merupakan salah satu kota di wilayah Deli, Sumatera Timur (Sumatera Utara sekarang), yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1600-an (Tengku Luckman, 1986 : 133). Dalam menghadapi Belanda pihak Aceh melakukan persiapan-persiapan guna mempertahankan wilayahnya di samping mencari bantuan ke luar negeri. Untuk membuat pertahanan yang kuat dibangunlah kuta yaitu semacam

benteng untuk memperkuat pertahanan wilayah, dan dibangun di sepanjang pantai besar Aceh.

Pada tanggal 5 April 1873 Belanda menyerbu pantai sebelah barat daya kota pantai cermin (Kutaraja) di bawah pimpinan Mayor Jendral JHR Kohler, pada masa agresi I setelah dijabat oleh Nieuwenhuijzen. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Teung Bata terpaksa meninggalkan Kuta (benteng pertahanan), setelah benteng tersebut berhasil diduduki pihak Belanda. Sejak itu pertahanan pihak Aceh terpaksa dipindahkan ke Masjid Raya Baituraman, namun masjid tersebut kemudian dibakar oleh pasukan Belanda pada tanggal 14 April 1873. Akhirnya tempat yang sekiranya dijadikan sasaran ialah istana sultan, untuk itulah maka pasukan Aceh ditempatkan di sana guna mempertahankan daerah tersebut, ternyata dalam peperangan tersebut Belanda dapat dipukul mundur.

Setelah gagal menguasai istana, pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda mengirim pasukan yang jauh lebih besar di bawah pimpinan Jendral Van Swieten. Sasaran kali ini adalah istana sultan. Pada tanggal 24 Januari 1874 istana sultan akhirnya jatuh ke tangan Belanda, tetapi Sultan dan para pembantunya telah meninggalkan istana. Selanjutnya di bawah pimpinan J. L. J. H. Pell (Jendral Van Swieten kembali ke Batavia) Belanda berusaha menaklukan daerah hulubalang di luar Aceh Besar (Hasan Saleh, 1992 : 15).

Di tiap-tiap daerah yang berhasil ditaklukan oleh Belanda, Aceh diharuskan menandatangani pernyataan sederhana yang terdiri dari enam

pasal (6 pasal), kemudian setelah tahun 1876 pernyataan tersebut ditambah menjadi delapan belas pasal (18 pasal) atau disebut dengan pernyataan panjang (Depdikbud, 1978 : 103). Walaupun beberapa daerah sudah dikuasai oleh Belanda, tetapi semangat perlawanan rakyat Aceh justru semakin meningkat. Dilihat dari segi persenjataan, pasukan Aceh dapat dikatakan kurang memadai dibanding Belanda. Tetapi rakyat Aceh mempunyai kekuatan lain yaitu jiwa ke-Islaman mereka, dibangunnya kuta pertahanan, selain itu juga dengan ikut sertanya seluruh lapisan rakyat yaitu mulai dari tuanku (keluarga sultan), hulubalang, para ulama sampai rakyat biasa.

Selain itu perjuangan mereka bukan hanya didominasi oleh kaum lelaki saja tetapi kaum wanita juga turut berjuang untuk membela bangsanya dari pengaruh kolonialisme. Karena pada masa penerus pemerintahan sultan Iskandar Muda peranan wanita di dalam pergerakan wanita Aceh sudah dimulai, ada sekitar empat wanita yang telah turut berpartisipasi dalam pemerintahan dan peperangan, juga pernah mengendalikan negara selama lebih kurang 60 tahun. Adapun wanita yang turut peran serta adalah Sri Ratu Tajul Alam Safiatudin Syah, Sri Ratu Nur Alam Nakiatuddin Syah, Sri Ratu Insyat Syah Zakiatuddin Syah, Sri Ratu Kumala Syah. Dengan demikian telah membuktikan bahwa wanita memegang peranan penting dalam pemerintahan dan juga dalam peperangan (Teuku H. Ainal Mardhiah Aly, 1980 : 291).

Walaupun telah terjadi pergantian pemimpin Belanda di Aceh, tetapi hal itu tidak membuat keadaan Belanda bertambah baik, pemerintah Hindia

Belanda memahami kesulitan yang dihadapinya sebab fakta-fakta dengan jelas menunjukkan hal tersebut, ini dapat kita lihat dengan semakin membengkaknya biaya yang dikeluarkan. Pada bulan Agustus 1881 pemerintah Belanda menjalankan blokade yang kuat, karena para pejuang Aceh masih berhasil memasukkan perbekalannya melalui pantai utara, oleh sebab itu pemerintah Belanda mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Seluruh pantai utara Aceh dari Ulee Lheue sampai ujung Diemant ditutup baik untuk ekspor-impor maupun penangkapan ikan.
2. Pelabuhan yang masih terbuka diawasi dengan ketat yaitu Ulee Lheue, Sigli, Simalonga, dan Lhoksumawe.
3. Armada Belanda diperkuat dengan dua buah kapal lagi.

Tetapi dengan tindakan yang demikian tidak terlalu mengkhawatirkan bagi pihak Aceh, karena penyelundupan perbekalan perang masih bisa dijalankan, selain itu para pejuang Aceh sudah mulai mampu membuat senapan dan amunisi sendiri (Marwati Djoned, 1993 : 253). Pada tahun 1883 terjadi peristiwa "Nisero"¹⁾ di mana kapal Inggris yaitu Nisero terdampar di pantai Pongah di Teumon, Aceh barat, kapal beserta awaknya ditahan oleh raja Teumon yaitu Teuku Iman Muda dan menyita muatannya, dan menuntut tebusan kepada pemerintah Inggris sebesar £100.000 (seratus ribu pundsterling) dan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini merupakan salah

¹⁾ Perlawanan dari pihak Aceh kepada Inggris dimana waktu itu Inggris mengadakan perjanjian dagang dengan pihak Aceh dengan mengirimkam konsul ke Aceh, namun akhirnya kapal Inggris ditawan oleh raja Teumon.

satu siasat saja sehingga Belanda merasa dirugikan (Muhammad Said, 1961 : 471). Selain itu pada tahun yang sama Belanda menderita pukulan hebat, karena pertanian yang ada di wilayah Belanda dan yang ada di daerah jajahan hasil yang ada tidak dapat di ekspor karena hasilnya rendah. Hasil-hasil tropis dari koloni-koloni Belanda di Jawa maupun Suriname ditolak oleh pasaran Eropa sehingga sangat merugikan pihak Belanda dan menjadikan kas kerajaan Belanda semakin menurun (Paul Van Tveer, 1985 : 114). Dengan adanya banyak peristiwa, Belanda memang dapat dikatakan mengalami banyak kerugian, dan karena Belanda sudah lama menghadapi peperangan justru membuat Belanda semakin tampak tak berdaya. Untuk mengantisipasi keadaan yang semakin buruk pada tanggal 16 - 17 Juni 1884 diadakan sidang rahasia Staten General dan memutuskan untuk melaksanakan "Stelsel Konsentrasi"²⁾ di Aceh. Pelaksanaan Stelsel Konsentrasi dimulai pada bulan Maret 1885 (Depdikbud, 1978 : 105). Sebenarnya keadaan Belanda yang semakin tidak berdaya ini disebabkan karena pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu tidak mungkin memenuhi kebutuhan biaya operasi militer yang tampak semakin meningkat dan tenaga personil militer dalam jumlah yang sangat besar, dan diharapkan dengan dilaksanakannya Lini Konsentrasi, maka Belanda akan mendapatkan keuntungan, kemudian untuk

²⁾ Stelsel konsentrasi atau konsentrasi stelsel merupakan garis pemusatan dengan membuat benteng-benteng di daerah-daerah yang telah diduduki oleh pihak Belanda sehingga Belanda tidak mengalami kesukaran dalam memerintah wilayah yang diduduki.

pelaksanaannya dengan menekan biaya serendah mungkin sehingga pasukan dikurangi sehubungan dengan dilaksanakan lini konsentrasi.

Dalam rangka mencari jalan penyelesaian perang yang lebih efektif yaitu dengan jalan mencari tahu tentang rahasia kekuatan Aceh terutama menyangkut kehidupan sosial budayanya, maka tahun 1891 dikirim seorang orientalis Aceh yaitu Dr Christian Snouck Hurgronje karena ia dianggap lebih paham tentang Agama Islam dan pernah mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh (Marwati Djoned, 1993 : 253). Dan berdasarkan laporan Snouck Hurgronje bahwa rakyat Aceh sebaiknya ditundukkan dengan kekerasan (Depdikbud, 1978 :106).

Pada pihak Aceh sendiri begitu banyak pemimpin yang terlibat, seperti Tengku Cik Di Tiro, Teuku Umar³⁾. Kemudian ada juga tokoh wanita yang turut membantu berperan dalam perang Aceh. Boleh dikatakan bahwa semua raja/ulubalang menyokong perang melawan Belanda, baik terus terang maupun menggunakan cara yang lain yang bersifat rahasia atau biasa disebut dengan cara bergerilya. Sedangkan Belanda sendiri juga mempunyai cara sendiri yaitu dengan siasat adu domba atau “*devide et impera*”

Untuk menghadapi perlawanan melawan Belanda tersebut para pemimpin banyak dibantu isterinya seperti yang dilakukan oleh Cut Meutia yang berjuang terus melawan Belanda dan merupakan isteri dari Pang

³⁾ Tengku : para pejabat yang tinggal di wilayah pantai, yang berarti sarjana. Gelar Tengku ini tidak bisa diturunkan kepada anaknya.
Teuku : Para pejabat tinggi yang tinggal di pusat kerajaan atau ibukota. Seorang Tengku dapat berubah menjadi Teuku, apabila dialihkan dari jabatan keagamaan ke jabatan pemerintahan. Sebenarnya kedudukan mereka sama yaitu sebagai pejabat pemerintahan.

Nanggaro. Ia keluar masuk hutan dengan membawa puteranya yang bernama Teuku Sabi, Cut Meutia juga puteri seorang pejuang, sehingga rimba belantara merupakan kehidupannya sehari-hari. Wanita pada jaman perang Aceh memang tidak berpangku tangan saja, mereka ikut serta dalam kancah perjuangan di segala bidang dalam memperjuangkan nasib negaranya. Meskipun kita tahu bahwa pada jaman perang Aceh tidak pernah mendapatkan pendidikan yang baik, namun wanita Aceh sudah menyadari bahwa :”setiap perjuangan akan memperoleh hasil yang gemilang apabila perjuangan itu dibantu oleh wanita (Teuku H. Ainal Mardhia, 1980 : 283).

Sebenarnya para wanita yang berjuang tersebut mempunyai kesadaran akan peranannya. Telah diketahui bahwa pemerintah Aceh mengambil Islam sebagai haluan hidup mereka. Di Aceh juga telah disebutkan bahwa kedudukan wanita disejajarkan dengan pria dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain Cut Meutia pejuang lainnya adalah Cut Nya Dien. Ia merupakan keturunan putera Nanta Seutia. Ia merupakan sosok wanita yang tegas dan tangkas serta mempunyai sifat kepahlawanan. Cut Nya Dien pernah menikah sampai dua kali. Pertama dengan Tengku Ibrahim Lam Nga yang juga merupakan seorang pejuang dalam melawan Belanda tetapi dalam perjuangan untuk membelah tanah airnya ia gugur sebagai pahlawan. Dengan gugurnya suaminya, Cut Nya Dien tidak putus semangat tetapi justru semakin bertambah semangat. Kemudian Cut Nya Dien menikah lagi dengan Teuku Umar yang umurnya jauh lebih muda, dan akhirnya mereka pun

berjuang melawan Belanda. Segala tutur kata Cut Nya Dien menyebar sampai ke pelosok pegunungan bagaikan minyak tanah menghampiri api, semangat pahlawan-pahlawan makin bertambah dan meluap-luap.

Meskipun ia seorang wanita namun ia mampu memimpin pasukan, buktinya ketika Teuku Umar gugur dalam perang ia masih meneruskan perjuangannya. Ia yang selalu mengatur rencana guna menentang Belanda. Pengorbanan Cut Nya Dien tidak setengah-setengah bahkan rumahnya dijadikan markas besar tempat berkumpul para pejuang. Perlawanan Cut Nya Dien mulai surut saat ia tertangkap dan di buang ke Jawa yaitu Sumedang dan sampai wafatnya di sana.

B. Perumusan Masalah

Untuk memperoleh alur pembahasan yang jelas maka perlu adanya perumusan masalah. Dalam penulisan ini masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan masyarakat Aceh sebelum perang ?
2. Apa latar belakang terjadinya perang Aceh ?
3. Bagaimanakah jalannya perang dan apa akibatnya- ?

Dalam bab pembahasan nanti penulis hanya akan membatasi rentang waktu mengenai perang Aceh antara tahun 1873 sampai 1896. Dengan alasan bahwa sebelum tahun 1873 Belanda tidak berani menguasai Aceh sebab Traktat London yang diratifikasi Belanda dan Inggris melarang Belanda

meluaskan daerahnya ke Aceh. Pendekatan Belanda pada waktu itu kebanyakan menggunakan sistim diplomasi atau perjanjian dengan sultan-sultan Aceh. Tetapi, setelah terjadi Traktat Sumatra 1871 pada tahun 1873 Belanda memaklumkan perang kepada Aceh tanpa ada kompromi, dan rakyat Aceh menyambut perang tersebut.

Sedangkan tahun 1896 merupakan puncak dari kemarahan Belanda atas Aceh, sehingga strategi perang diubah menjadi sistim kekerasan. Belanda berhasil menghancurkan tempat kediaman Teuku Umar dengan menggunakan persenjataan yang dipersiapkan. Di samping itu di pos Lini Lam Jamu dipasang sebuah baterei khusus dengan dua belas meriam dan delapan mortir berat secara terus menerus selama enam belas hari enam belas malam.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai perang Aceh dari masa ekspedisi sampai masa kekerasan antara tahun 1873 sampai 1896. Terutama mengenai :

1. Keadaan masyarakat Aceh sebelum perang.
2. Latar belakang penyebab terjadinya perang Aceh dengan memaparkan tentang pendudukan Belanda dan faktor-faktor perang Aceh.

3. Jalannya perang dengan memaparkan strategi yang digunakan dalam perang baik pihak Aceh dan pihak Belanda, peranan wanita yang turut berperang dan dampak dari perang Aceh itu sendiri.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penulisan ini berguna untuk mengetahui sejarah perang Aceh antara tahun 1873-1896, di samping itu penulisan ini berguna bagi :

1. Pembuat keputusan : Dalam hal ini Universitas Sanata Dharma pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah dari perang Aceh.
2. Para mahasiswa : Hasil penulisan ini berguna sebagai informasi mengenai Perang Aceh antara tahun 1873-1896. Dengan harapan agar mahasiswa mempertimbangkan secara rasional baik tidaknya imperialisme maupun kolonialisme itu.

E. Tinjauan Pustaka

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini merupakan sumber tertulis yang tercantum dalam daftar pustaka, beberapa di antaranya akan diketengahkan sebagai berikut :

1. *Perang Aceh : Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje (1985).*

Tulisan dari Paul Van't Veer, dalam bukunya tersebut menceritakan perang

Aceh secara keseluruhan baik keterlibatan Belanda maupun dari pihak Aceh sendiri. Ada empat tahapan dalam periode perang Aceh tersebut, Perang yang pertama dimulai pada tahun 1873, perang Aceh yang ke dua dimulai dari 1874-1880, perang Aceh yang ke tiga dimulai dari tahun 1884-1896, dan yang terakhir perang Aceh yang ke empat dari tahun 1896-1942.

Di setiap peperangan banyak bermunculan para tokoh yang silih berganti berkuasa di Aceh dengan segala macam sepak terjangnya. Di samping itu dalam buku tersebut banyak menggambarkan awal mula kedatangan Belanda ke Aceh dengan berbagai perselisihan antara Belanda dengan Inggris maupun dengan penduduk pribumi (rakyat Aceh).

Dalam peperangan tersebut memang memakan waktu yang cukup lama karena dari masing-masing penguasa yang berkuasa di Aceh mempunyai strategi sendiri-sendiri dalam memimpin peperangan melawan kekuasaan Belanda di Aceh. Di samping itu diceritakan keadaan Belanda pada waktu meletusnya peperangan tersebut dalam menghadapi serangan dari Dili, Gayo, Lagkat Tamiang, Alas, dan sebagainya, hingga akhirnya Jepang dapat menguasai Indonesia sampai tahun 1942.

2. *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV (1993)*. Dari Mawarti Joned, Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. Buku tersebut merupakan sebuah buku yang terdiri dari berbagai judul, salah satunya adalah perang Aceh. Buku Sejarah Nasional jilid IV dipakai sebagai salah satu sumber penelitian untuk mendukung penulisan mengenai perang Aceh seputar tahun 1873-1896.

Isi dari buku tersebut mengenai garis besar perang Aceh serta perjanjian-perjanjian yang dapat memicu perang Aceh. Selain itu pada buku tersebut juga mendeskripsikan tentang keadaan masyarakat Aceh sebelum terjadi perang Aceh yang pada waktu itu raja merupakan simbol kekuasaan tertinggi.

Sedangkan mengenai jalannya perang Aceh hanya disinggung secara singkat dan tidak menggambarkan kapan perang Aceh bebar-benar telah dimulai, sehingga penulis di sini hanya menggunakan buku tersebut untuk menjelaskan mengenai keadaan masyarakat Aceh.

3. *Atjeh Sepanjang Abad (1961)*. Tulisan Muhammad Said digunakan dalam mendeskripsikan awal mula keberadaan negeri Aceh beserta para sultan yang pernah memegang tampuk kepemimpinan. Dan perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan antara pihak Inggris dengan Belanda maupun Belanda dengan Aceh sampai akhir perang Aceh.

Adapun isi dari buku Aceh sepanjang abad mengisahkan perebutan wilayah di Sumatra antara Inggris dan Belanda. Pada akhirnya perebutan itu melahirkan banyak perjanjian baik antara Inggris dengan Belanda maupun dengan pribumi setempat, dan perjanjian sebagai konsekuensi konflik yang terjadi adalah traktat London pada tahun 1824 kemudian traktat Sumatra pada tahun 1871. Sehingga masing-masing perjanjian tersebut mengakibatkan konsekuensi sendiri-sendiri. Salah satu contoh adalah traktat Sumatera pada tahun 1871 yang mengakibatkan Aceh jatuh ke tangan Belanda, dan di bawah kekuasaan pemerintah Belanda.

Di samping itu buku Aceh Sepanjang abad memaparkan jalannya perang Aceh dengan berbagai strategi dari pihak Aceh maupun Belanda dengan berbagai penyelesaian perang baik cara diplomasi maupun dengan kontak senjata.

4. *Bunga Rampai Tentang Aceh (1980)*. Merupakan buku yang disunting dari berbagai tulisan mengenai Aceh baik itu asal mula nama negeri Aceh, pengaruh Islam terhadap kebudayaan Aceh dalam perang Sabil, pergerakan wanita di Aceh masa lampau dan masa kini. Buku ini disunting oleh Ismail Suny. Sedangkan buku-buku yang lain, digunakan sebagai pelengkap dalam penyusunan karya tulis ini yang berhubungan/bertalian dengan perang Aceh dari masa ekspedisi sampai masa kekerasan antara tahun 1873 - 1896.

F. Metode Penulisan

Dalam mendeskripsikan mengenai perang Aceh antara tahun 1873-1896, di sini penulis menggunakan tehnik penelitian historis yaitu suatu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu atau peninggalan-peninggalan masa lalu baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu, terlepas dari keadaan masa sekarang dalam hubungan kejadian atau keadaan masa lalu. Metode historis dapat dilakukan dengan dua cara :

- a. Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas pada kurun waktu tertentu pada masa lampau.
- b. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang dan sebagai akibat data masa lalu digunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkuman yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Metode historis ini lebih memusatkan pada data masa lampau berupa peninggalan dokumen yang berupa buku-buku, arsip, benda bersejarah dan lain-lain (Hadari Nawawi, 1985 : 30).

Ditinjau dari sudut penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research), kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik di perpustakaan maupun di tempat lain. Literatur tidak hanya terbatas pada buku-buku tetapi juga berupa bahan dokumentasi, majalah, koran, batu tertulis yang berupa prasasti, dan lain-lain (Winarno Surachmad, 1978 : 47).

Sedangkan menurut I Gusti Ngurah Agung, penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum di publikasikan (I Gusti Ngurah Agung Gede, 1992 : 9).

Dengan uraian diatas, maka sebagai langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diuji kebenarannya dan memetik unsur-unsur yang dipercaya dari sumber tersebut untuk menjawab masalah yang telah ditentukan.
2. Sumber tersebut merupakan data-data masa lalu yang digunakan sebagai informasi untuk menjawab permasalahan, dan sumber-sumber tersebut penulis himpun dari berbagai literatur yang ada di perpustakaan berupa buku, majalah, koran, bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya.
3. Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut disajikan dalam bentuk penulisan /historiografi yang bersifat deskriptif analitik yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek/subyek penelitian yang berdasarkan faktor-faktor terkumpul.

Jadi di sini, penulis mengadakan studi pustaka terhadap buku-buku, laporan-laporan, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan perang Aceh antara tahun 1873-1896.

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan dengan sistematika sebagai berikut:

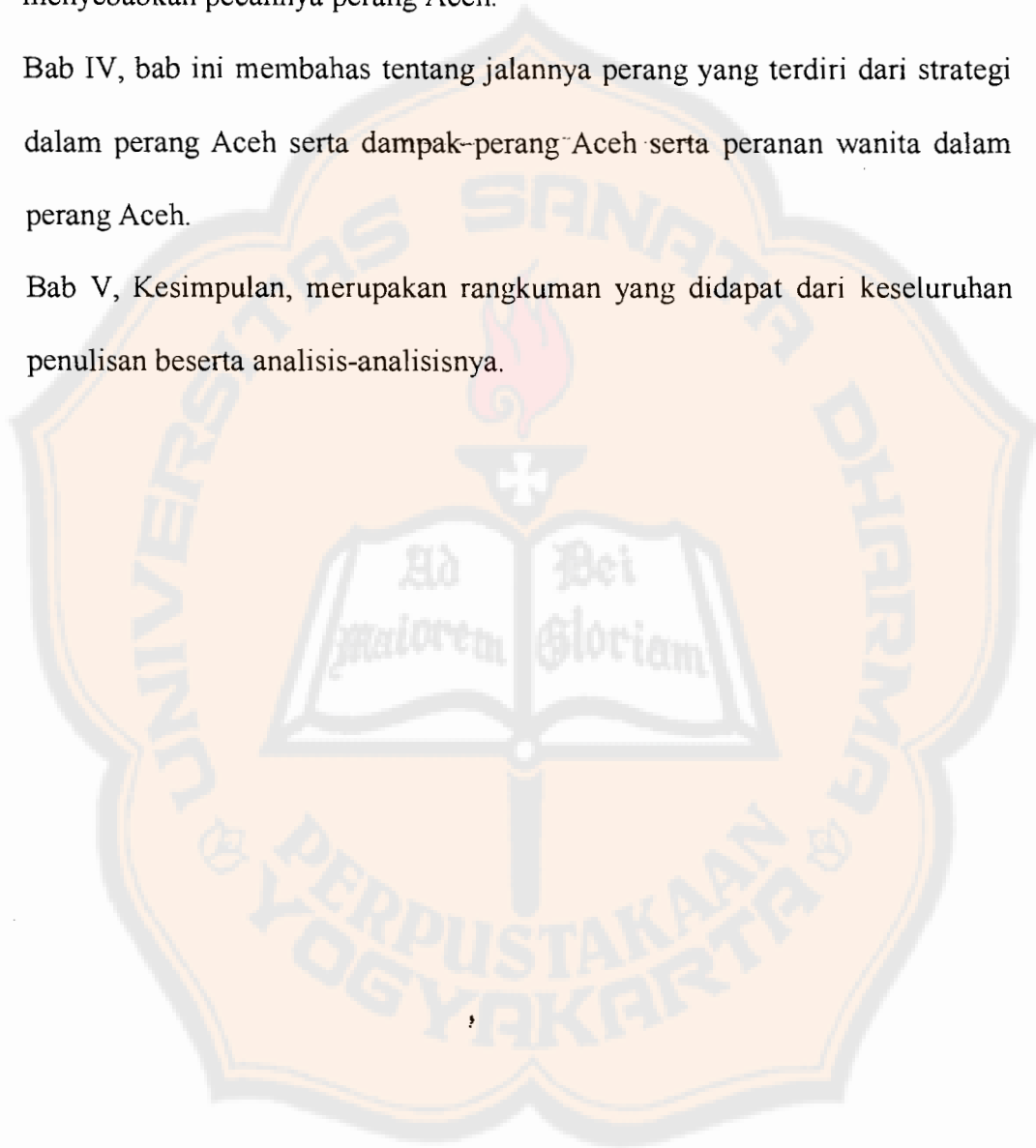
Bab I, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metode penulisan.

Bab II, bab ini membahas tentang keadaan masyarakat Aceh yang terdiri dari sub pokok bahasan yaitu mengenai struktur masyarakat, kondisi masyarakat, dan sistem pemerintahan.

Bab III, bab ini membahas tentang latar belakang terjadinya perang, sub pokok bahasanya meliputi masa pendudukan Belanda dan faktor yang menyebabkan pecahnya perang Aceh.

Bab IV, bab ini membahas tentang jalannya perang yang terdiri dari strategi dalam perang Aceh serta dampak-perang Aceh serta peranan wanita dalam perang Aceh.

Bab V, Kesimpulan, merupakan rangkuman yang didapat dari keseluruhan penulisan beserta analisis-analisisnya.



BAB II KEADAAN MASYARAKAT ACEH SEBELUM PERANG

A. Sekilas Tentang Kesultanan Aceh

Aceh merupakan salah satu kerajaan yang penting di Sumatra yang terletak di ujung utara pulau tersebut. Pada waktu itu Aceh mempunyai peranan yang besar karena terletak di jalur lalulintas perdagangan laut, dan juga karena Aceh adalah salah satu negara yang masih berdaulat penuh seperti yang tertulis dalam Traktat London (Muh. Said, 1961 : 22). Pusat negara Aceh meliputi wilayah Aceh Besar dengan ibu kota yang dinamakan Banda Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh berhasil memperluas dan memperkuat kekuasaannya berkat majunya perdagangan, sehingga daerah-daerah yang ada di Sumatera ini menyatakan tunduk kepada Aceh, yang mana bebas dan masih mempunyai otonomi yang sebesar-besarnya.

Keemasan Aceh memuncak pada waktu diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), ketika Aceh dapat menguasai jalur pantai sebelah Barat maupun sebelah timur, dan para pedagang asing dipaksa untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan Aceh, kekayaan semakin bertambah dari pajak dan bea cukai. Setelah wafatnya Sultan Iskandar, pamor Aceh mulai menurun. Baru pada tahun 1802 Sultan Alaudding Jauhar naik tahta dan memerintah sampai tahun 1823. Sultan Alaudding berkewajiban untuk mengembalikan kewibawaan serta kekuasaan pemerintah. Setelah meninggal ia digantikan oleh putra-putri beliau.

Salah satunya adalah Sultan Muhammad Daud. Pada awal kepemimpinannya terjadi suatu peristiwa yang penting yaitu penandatanganan Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824 antara Inggris dan Belanda (Marwati joned, 1993 : 66-67). Pokok dari persetujuan itu adalah tentang pembagian daerah kekuasaan Inggris dan Belanda di Indonesia dan Malaya. Walaupun tidak tercantum dalam naskah persetujuan itu namun dalam nota dari Belanda maupun Inggris jelas terungkap keduanya, yaitu akan menghormati kemerdekaan Aceh (Muh. Said, 1961 : 251-254).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Baron Hendrick Vagel dan Anton Falok sebagai wakil dari Belanda dan George Conning dan Charles Walkin Williams sebagai wakil dari Inggris akan tetapi Aceh sendiri tidak diikutsertakan dalam perundingan. Dengan adanya traktat itu Belanda tidak berani mengusik Aceh: Setelah terusan Suez dibuka, arus pelayaran di selat Malaka semakin ramai, sehingga Belanda berusaha menguasai Aceh. Karena terhalang oleh Traktat London 1824, maka pada tahun 1871 dibuat Traktat Sumatera oleh Belanda dengan Inggris, yang antara lain menyatakan bahwa Belanda boleh meluaskan daerahnya ke seluruh Sumatera termasuk Aceh. Dengan adanya Traktat itulah awal penjajahan Belanda atas Aceh walau belum terjadi konflik nyata yang nantinya akan terjadi perang besar di Aceh.

B. Struktur Masyarakat Aceh Sebelum Pendudukan Belanda

Susunan masyarakat Aceh tidak jauh berbeda dari susunan masyarakat

tradisional lain di Indonesia. Pada dasarnya susunan tersebut terdiri dari tiga kelompok besar dalam masyarakat yang bertingkat. Adapun strukturnya sebagai berikut :

1. Tingkat yang paling atas adalah Raja yang bergelar Sultan
2. Tingkat yang kedua terdiri dari kaum bangsawan dan para pejabat tinggi pemerintah baik di pusat kerajaan yaitu ibu kota dan di daerah-daerah. Sebutan mereka yang ada di pusat ibu kota adalah Teuku. Sedangkan di daerah-daerah pantai timur adalah Tengku karena mendapat pengaruh dari Melayu.
3. Merupakan golongan yang paling besar adalah rakyat biasa.

1. Golongan Raja

Golongan Raja di sini adalah Sultan yang tinggal di pusat pemerintahan dan menurut hukum Raja berkewajiban melindungi rakyat dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan. Dalam memerintah Sultan dibantu oleh pejabat-pejabat birokratis baik sipil maupun keagamaan, mereka mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan misalnya jabatan sebagai Perdana Menteri. Wasir (mentri), Gadhi (jaksa), laksamana, dan syahbandar (Marwati Djoned, 1993 : 67). Tugas raja selain melindungi rakyat juga mempunyai kekuasaan untuk mengangkat orang-orang yang ahli dalam lapangan masing-masing untuk mengurus kerajaan juga mengangkat para ulama untuk mengembangkan pendidikan yang banyak didirikan di Kesultanan Aceh untuk membina Agama Islam, sehingga akhirnya Aceh dapat disebut sebagai Serambi Mekah karena pada

dasarnya dapatlah dimengerti bahwa dasar utama masyarakat Aceh adalah Agama Islam yang telah berabad-abad lamanya dianut oleh sebagian besar rakyat Aceh (Ismail Suny, 1980 : 46).

Telah dikatakan bahwa raja dan keluarganya hidup di istana yang terletak di ibu kota Banda Aceh Darussalam. Istana itu dikelilingi oleh lapangan yang berbentuk bulat telur dan diperkuat oleh empat lapis tembok pertahanan di sebelah luarnya. Bahkan menurut pengamat Perancis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) sebelum sampai pada istana yang sebenarnya kita harus melalui empat buah pintu gerbang dan yang terakhir dinding batunya sengaja diperkuat sampai 50 langkah tebalnya. (A. Hasjimy, 1975 ; 25)

Kesultanan Aceh diperintah oleh raja yang turun temurun, dan pergantian sultan biasanya dilakukan bila Sultan yang memerintah sudah meninggal dunia. Pengganti Raja yang sudah meninggal adalah putra laki-laki raja yang lahir dari istri pertama. Umumnya yang mengganti adalah putra yang sulung namun apabila hal ini tidak mungkin maka dapat diangkat putra laki-laki yang lain. Bila tidak ada seorangpun pengganti laki-laki yang dianggap pantas, seorang putri atau adakalanya kemenakannya ditunjuk sebagai pengganti raja. Sedang apabila putra yang naik tahta itu masih di bawah umur dan dianggap belum mampu memerintah sendiri, dapat dibentuk dewan perwalian yang akan memegang pemerintahan sementara sampai saat anak tersebut menjadi dewasa untuk memerintah sendiri. Biasanya yang menjadi wali adalah ibunya atau pamanya sendiri.

2. Golongan Bangsawan

Telah disebutkan di atas bahwa dalam garis besarnya terdapat dua macam kaum bangsawan di Aceh. Pertama adalah mereka yang merupakan keturunan Sultan Aceh dan golongan yang kedua adalah para bangsawan yang merupakan para Uleebalang dan memakai gelar Teuku atau di daerah-daerah pantai disebut Tengku. Sultan telah dijelaskan di atas sedangkan Tengku atau Teuku akan dijelaskan di bawah ini.

Pada umumnya Uleebalang (hulubalang) menguasai sebuah Nangroe (nagri) yaitu gabungan beberapa mukim asalnya dari pembantu raja yang terkemuka yang karena jasanya kemudian diberi hadiah sejumlah mukim untuk penghidupan. Sistem ini terutama mulai berkembang di masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (Anthony Reid, 1987 ; 2)

Uleebalang sebagai penguasa nangroe juga bertugas mempersiapkan tenaga tempur bila terjadi peperangan. Ia juga melaksanakan segala perintah sultan, menyediakan perbekalan perang bila diperlukan oleh pemerintah pusat dan memberi upeti kepada Sultan. Para Uleebalang ini mempunyai kekuasaan yang besar di daerahnya masing-masing dan sampai batas-batas tertentu mereka ini adalah pemimpin yang otonom. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hak-hak istimewa seperti hak-hak dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang bersalah, hak membunyikan meriam pada saat matahari terbenam, hak untuk dipanggil dengan nama daulat dan hak untuk membuat mata uang (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977/1978 : 77-78).

Para Uleebalang menerima kekuasaanya langsung dari Sultan Aceh. Mereka memerintah secara turun-temurun dan setiap pergantian pemimpin harus disahkan oleh Sultan.

3. Golongan Masyarakat Biasa

Golongan masyarakat biasa ini merupakan masyarakat pada umumnya di luar golongan raja dan golongan bangsawan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tampaknya rakyat Aceh menganut asas gotong royong seperti yang umum di tempat-tempat lain di Indonesia. Rakyat Aceh bukanlah bangsa yang bebas pajak, tidak sedikit penghasilan negara didapat dari pungutan pajak atau dari cukai yang ditarik oleh pejabat-pejabat kerajaan urusan pajak. Berbagai pungutan pajak dibebankan seluruhnya pada rakyat, sehingga pada waktu itu banyak beban pajak yang harus mereka bayar. Sebagai contoh bagi mereka yang mempunyai tanah ladang dikenakan pajak tanah atau wase tanah, sedangkan untuk barang-barang yang diperjualbelikan di pasar-pasar dipungut pajak pasar (adat Peukan). Di samping itu di daerah-daerah yang terdapat muara sungai di situ terdapat rumah cukai. Para pejabat cukailah yang mengawasi keluar masuknya perahu-perahu di muara, sehingga perahu-perahu yang memasuki muara diharuskan membayar cukai muara (Wase Kuala). Oleh sebab itu barang-barang dagangan yang lain sekiranya menjadi barang ekspor jika melalui muara tersebut akan dikenai beban atau tarif yang sesuai dengan barang dagangan yang dibawa oleh setiap kapal. Biasanya barang-barang ekspor tersebut

merupakan barang yang mempunyai mutu yang terbaik sehingga nantinya akan mendatangkan devisa bagi negara Aceh. Adapun barang-barang yang biasanya merupakan barang ekspor yaitu lada yang nantinya dikenakan pajak atas lada atau wase lada, kemudian pajak hasil hutan misalnya kayu dikenakan wase uteun (pajak hasil hutan). (Marwati Djoned, 1993 : 86)

Struktur masyarakatnya dibagi menjadi tiga golongan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Tetapi ada hal yang menarik bahwa dalam masyarakat Aceh juga ada penggolongan yang sifatnya kesukuan atau biasa disebut dengan soeke (suku) atau kawon (kaum). (Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1977/1978 : 89). Adapun penggolongan atas kawon ini didasarkan atas keturunan dari nenek moyang pihak laki-laki dan adat istiadatnya. Ada 4 kawon (kaum) yaitu :

1. Kawon Imeum Peut (kaum imam Empat)

Mereka adalah berasal dari orang Hindu yang telah memeluk agama Islam.

2. Kawon Lherentoih (suku Tiga Ratus)

Ialah mereka yang berasal dari orang-orang Mantir dan Batak.

3. Kawon Tak Batu

Yaitu mereka yang terdiri dari orang-orang seperti orang Arab, orang Parsi dan orang Turki.

4. Kawon Ja Sandang

yaitu orang Hindu yang bekerja untuk majikan masing-masing.



Keempat kawon tersebut mempunyai pimpinan yang dipilihnya sendiri-sendiri dan disebut panglima Kawon sehingga sultan dapat menyerahkan segala tanggung jawabnya kepada panglima kawon. (Marwati Djoned, 1993 : 87).

C. Sistem Pemerintahan

Dengan adanya susunan masyarakat yang seperti di atas maka garis-garis pertanggung jawaban atas segala masalah yang muncul di Aceh dapat diselesaikan dengan dibantu adanya lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam garis besarnya wilayah kasultanan Aceh terbagi atas tiga macam wilayah yaitu daerah inti, daerah pokok, dan daerah taklukan, yang dimaksud dengan daerah inti adalah wilayah yang merupakan pusat pemerintahan yang dinamakan Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh dinamakan Aceh Rayeuk. Daerah pokok adalah daerah yang dikuasai oleh kesultanan Aceh yang kemudian digabungkan di bawah kedaulatan sultan Aceh, daerah pokok tersebut meliputi Pidie, Samudra Pase, Perlak, Gayo, Alas, Batak, Singkel, Teureumon, dan Barus. Sedangkan daerah taklukan merupakan daerah-daerah yang telah ditundukkan oleh Aceh dan menyatakan dirinya takluk kepada Sultan Aceh atau dengan kata lain sebagai daerah atau negara taklukan Aceh.

Daerah yang dikuasai atau ditaklukan oleh kesultanan Aceh merupakan kota-kota pelabuhan dan yang menghasilkan barang-barang yang dapat mendatangkan devisa. Sebagai contoh negara Pidie yang terkenal sebagai lumbung kerajaan Aceh karena tanahnya yang subur sehingga cocok untuk

persawahan, kemudian daerah Pasaman dan Tiku yang menghasilkan lada, merupakan barang ekspor. Selain itu baik daerah Barus dan Singkil sebagai daerah penghasil kapur barus. Untuk itulah kesultanan Aceh mencari daerah taklukan yang sekiranya dapat mendatangkan pemasukan yang cukup besar bagi kerajaan Aceh sendiri.

Adapun bentuk wilayah dari kesatuan kesultanan Aceh terdiri dari :

1. Gampong
2. Mukim
3. Nangroe
4. Sagoe (A. Hasjmy, 1975 : 75).

1. Gampong

Gampong merupakan tingkat pemerintahan yang terendah yang berarti kampung (pemerintah desa). Gampong ini biasanya terletak dekat dengan istana raja dan kampung atau gampong ini diwajibkan untuk menyediakan tenaga secara bergilir untuk menjaga istana dan membersihkannya. Sebuah Gampong terdiri dari beberapa rumah yang didiami oleh sejumlah keluarga dan dikepalai oleh seseorang atau lebih yang disebut Keucik. Keucik dibantu oleh seseorang atau lebih pembantu yang disebut Waki (Waeil). Selain itu keucik juga dibantu oleh tokoh-tokoh kampung atau orang tua yang arif bijaksana dan dalam bahasa Aceh disebut Oreung Tuha. Kemudian dari pada itu gampong juga mempunyai orang melaksanakan tugas sehari-hari atau dengan kata lain sebagai badan pemerintahan harian yaitu Tengku yang disebut Imam Rawatib dan dibantu oleh Tuha Peut

(empat orang cerdas pandai). Sedangkan di daerah kesatuan gampong dikepalai oleh seorang Datu.

2. Mukim

Mukim merupakan wilayah diatas gampong. Kata mukim sendiri di ambil dari bahasa Arab “Muqim” yang berarti tempat tinggal. Dalam satu mukim paling sedikit terdapat 8 gampong dan pemimpin mukim dipimpin oleh seorang imam mukim dari qadli mukim. Adapun tugas dari kepala mukim (imeam mukim) adalah mencakup soal pengaturan pemerintahan dan berada di atas keucik. Selain itu imeam mukim biasanya seorang ulama dan bertugas memimpin sembahyang Jum’at.

3. Nanggroe

Nanggroe merupakan sebutan lain dari negeri, di mana sekarang ini dinamakan kecamatan. Nanggroe dipimpin oleh seorang uleebalang dan seorang qadli nanggroe. Sedangkan uleebalang sendiri mempunyai gelar yang berbeda menurut nanggroenya masing-masing. Sebagai contoh : ada yang bergelar teuku laksamana, Teuku bentara dan sebagainya. (A. Hasjmy, 1975 : 75)

4. Sagoe

Merupakan wilayah inti kasultanan Aceh (Aceh Raya), yang terbagi dalam tiga buah kesatuan yang disebut sagoe (sagi) dan wilayah pusat kerajaan. Masing-masing Sagoe (sagi) terdapat beberapa buah nanggroe, dan tiap-tiap sagi

dipimpin oleh seorang Panglima Sagi. Sedangkan wilayah kerajaan sendiri meliputi :

- a. Istana sultan dan gampong-gampong.
- b. Mukim-mukim
- c. Masjid Raya. (Marwati Djoned, 1993 : 7)

Jadi dengan adanya gambaran sedikit di atas para hulubalang atau panglima sagi mempunyai kekuasaan yang otonom sehingga raja atau sultan hanya berfungsi sebagai lambang pemersatu yang diakui oleh hulubalang (uleebalang).

Selain itu ada juga lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah :

1. Balai Rong Sari

Yaitu lembaga yang dipimpin oleh sultan sendiri atau sebagai lembaga tertinggi negara. Anggota pada lembaga ini terdiri dari empat (4) uleebalang dan 7 alim ulama.

2. Balai Majelis Mahkamah Rakyat

Merupakan badan legislatif terutama yang bertugas untuk membuat dan mengubah undang-undang (semacam dewan perwakilan rakyat sekarang). Lembaga ini beranggotakan 73 orang yang mewakili 73 mukim dan dipimpin oleh qadli malikul adil atau qadi raja yang adil.

3. Balai Gading

Bertindak menjalankan tugas sehari-hari atau dengan kata lain sebagai Perdana Menteri dan dipimpin oleh seorang wasir (menteri).

4. Balai Furdhah

Balai ini dipimpin oleh seorang wasir yang bergelar menteri sri paduka. Ia mengatur dan mengurus soal ekonomi dan perdagangan/perniagaan (sekarang setara dengan departemen perdagangan).

5. Balai Laksamana

Balai laksamana ini hampir sama fungsinya dengan pertahanan dan keamanan karena tugasnya yang utama adalah menjaga keamanan dan mempertahankan kesultanan. Balai ini juga mengurus para prajurit baik darat maupun laut. Dalam balai ini dipimpin oleh seorang wasir yang bergelar Orang Kaya Laksamana Amirul Harb.

6. Balai Majelis Mahkamah

Balai ini fungsinya hampir sama dengan departemen Kehakiman sekarang, dan dipimpin oleh Seri Raja Panglima Wasir Imzan.

7. Balai Baitul Mal

Berfungsi seperti pada departemen Keuangan sekarang. Dalam balai ini juga dipimpin oleh seorang Wasir yang bergelar Orang kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wasir Derham. Yang mengurus segala soal keuangan dan soal anggaran biaya.

Di lain pihak untuk melengkapi lembaga yang telah ada di atas, masing-masing ada sejumlah menteri yang bertugas menangani masalah-masalah yang lebih khusus seperti halnya pada :

1. Seri Maharaja Mangkubumi yang mengurus segala hulubalang dan pamong praja serta lain-lain yang berhubungan dengan soal pemerintahan (dalam arti sekarang merupakan Menteri Dalam Negri).

2. Wasir Badhul Muluk

Yaitu wasir yang mengurus perutusan keluar negeri dan perutusan yang datang ke dalam negeri atau dengan kata lain menyangkut hubungan diplomatik, pada jaman sekarang ini disetarakan dengan Menteri Luar Negeri.

3. Wasir Kun Daraja

Yang bertanggung jawab secara khusus dalam keraton dan merangkap menjadi Syahbandar atau penguasa kota Banda Aceh Darusallam

4. Wasir Rama Setia

Sebagai pengurus pajak diseluruh kesultanan Aceh.

5. Seri Maharaja Gurah

Sekarang setara dengan Menteri Kehutanan, karena dialah yang mengurus segala sesuatu tentang hutan (A. Hasjimy, 1975 : 73).

Di samping itu masih ada lembaga lain yang berupa balai yaitu semacam kantor jawatan yang dipimpin oleh seorang Uleebalang Tuha. Adapau lembaga tersebut :

1. Balai Satria Hukama, merupakan tempat berkumpulnya hukama dan para ulama.
2. Balai Ahli Siasah, merupakan jawatan yang berhubungan dengan sosial politik.

3. Balai Muzafir, sebagai lembaga yang mengurus orang-orang yang datang dari luar Aceh.
4. Balai Sufinah, merupakan jawatan yang berhubungan dengan pelayaran.
5. Balai Fakir Miskin, semacam kantor yang mengurus orang yang tidak mampu atau dengan kata lain jawatan sosial.

Tetapi dengan adanya lembaga-lembaga itu bukan berarti sudah tidak ada lembaga atau jawatan lain dan dengan adanya lembaga tersebut oleh Sultan dirasa belumlah lengkap. Karena hal ini dapat dilihat dengan adanya pengangkatan menteri yang berjumlah 24 yang diangkat oleh Sultan sendiri. Jabatan-jabatan yang telah diangkat oleh Sultan meliputi :

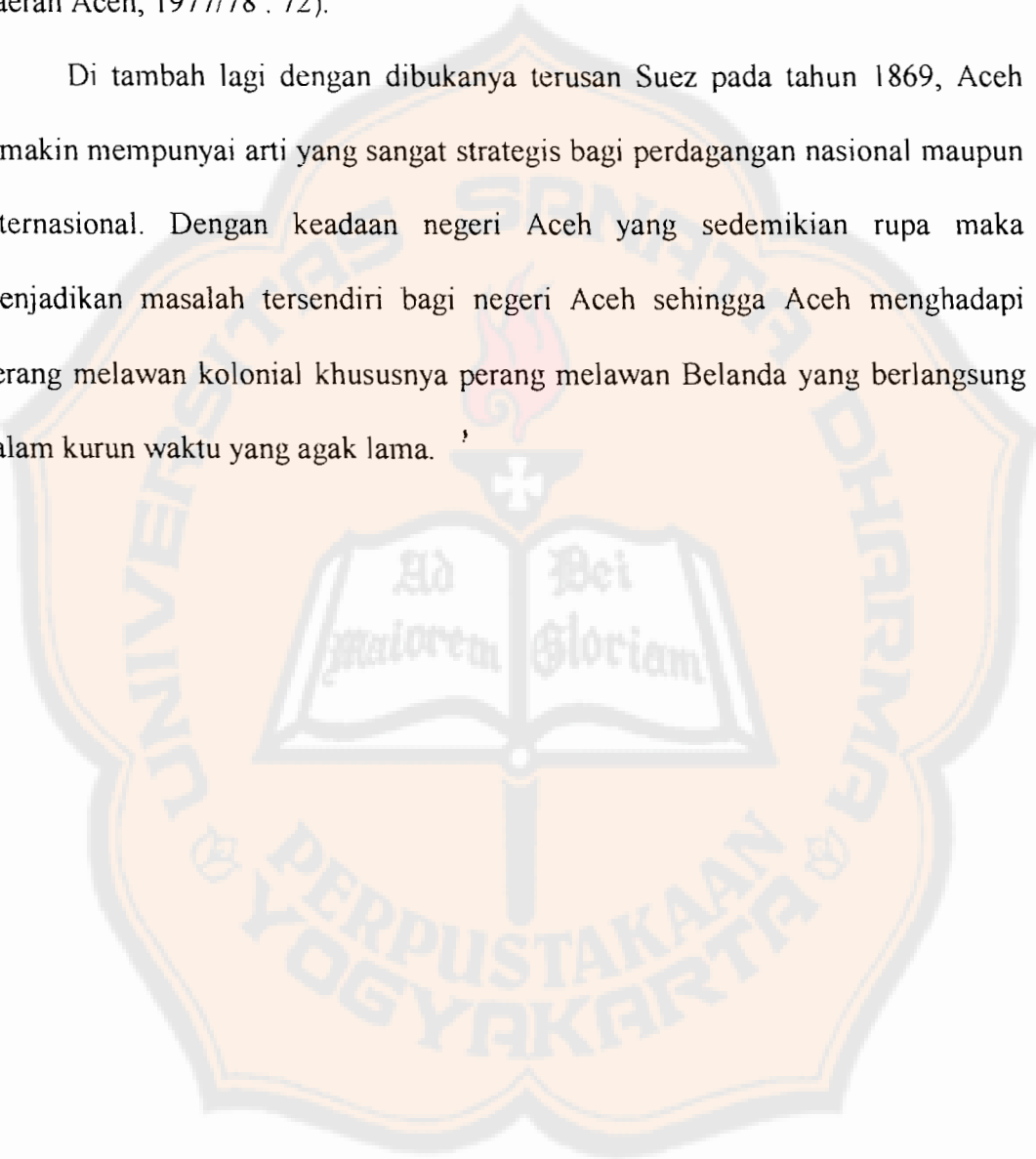
1. Karekun Katibul Muluk atau Sekertaris Raja.
2. Rais Wazirat Addsulah atau Perdana Menteri.
3. Wasirat Adaulah atau menteri negara.
4. Wasirat Al Akham atau menteri agung.
5. Wasirat Al Harbiyyah atau menteri peperangan.
6. Wasirat Al Haqqamiyah atau menteri kehakiman.
7. Wasirat Al Daraham atau menteri keuangan.
8. Wasirat Al Mizan atau menteri keadilan.
9. Wasirat Al Maarif atau menteri pendidikan.
10. Wasirat Al Kharijiyah atau menteri luar negeri.
11. Wasirat addakhilyyah atau menteri dalam negeri.
12. Wasirat at al augaf atau menteri urusan waqaf.

13. Wazirat al azzizaah atau menteri pertanian.
14. Wazirat al maliyyah atau menteri urusan harta.
15. Wazirat al muwasakalat atau menteri perhubungan.
16. Wazirat al asyighal atau menteri kerja.
17. Syakh al Islam mufte empat syakh keabah.
18. Qadhi Malikul adil atau Kadhi raja yang adil.
19. Wazir tahakkum Muharzijlailan atau ketua pengurus korps kesenian.
20. Qadhi mualdlan atau kadhi/jaksa agung.
21. Imam Bandar Darul Makmur Darussalam.
22. Keucik Muluk (Keucik Raja).
23. Imam Muluk atau Imam Raja.
24. Panglima Khanduri Muluk atau Ketua penyelenggara kenduri raja (Marwati Djoned, 1993 : 82).

Dengan demikian baik struktur masyarakat maupun sistim pemerintahan masyarakat Aceh sangatlah teratur. Keadaan demikianlah yang menjadikan Aceh menjadi kerajaan terbesar sekitar tahun 1700 an. Telah dikatakan di atas bahwa Aceh sebelum pendudukan Belanda telah digambarkan sebagai negeri yang makmur atau dengan bahasa Jawa diistilahkan “Gemah Ripah Loh Jinawi”, karena pada umumnya mata pencaharian rakyat Aceh adalah bercocok tanam dan berdagang. Selain itu kita ketahui bahwa Aceh juga mempunyai dan menguasai pelabuhan-pelabuhan yang strategis sehingga di sana dapat dijumpai para pedagang-pedagang asing baik dari Cina, Gujarat, Portugis, Arab maupun

Benggala. Di mana mereka membutuhkan barang-barang seperti lada, timah, emas, sutera, minyak, kapur barus, kemenyan, dan gading gajah (Sejarah Propinsi Daerah Aceh, 1977/78 : 72).

Di tambah lagi dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, Aceh semakin mempunyai arti yang sangat strategis bagi perdagangan nasional maupun internasional. Dengan keadaan negeri Aceh yang sedemikian rupa maka menjadikan masalah tersendiri bagi negeri Aceh sehingga Aceh menghadapi perang melawan kolonial khususnya perang melawan Belanda yang berlangsung dalam kurun waktu yang agak lama.



BAB III LATAR BELAKANG PERANG ACEH

A. Traktat London 1824

Sebelum adanya Traktat London 1824, antara Aceh dengan Inggris telah terjalin hubungan dagang dan mereka juga telah sering mengadakan berbagai perjanjian baik yang dilakukan oleh pihak Aceh maupun Inggris, ditambah lagi persahabatan Aceh dan Belanda dengan para penguasa atau para Sultan pada jaman sebelum perang. Perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan tidak semuanya akan mereka taati bahkan banyak perjanjian yang dilanggar kesepakatannya, seperti yang terjadi pada Traktat London 1824 yang berjumlah 17 pasal, dan ke-17 pasal tersebut tidak menyinggung soal Aceh. Dengan adanya traktat London tahun 1824 yang demikian, maka eksistensi/keberadaan Aceh sangat ditentukan oleh traktat London tersebut. Ke-17 pasal yang ada memang menguntungkan bagi Aceh tetapi juga sebaliknya. Bahkan perjanjian yang telah menjadi kesepakatan antara Belanda-Inggris tersebut telah banyak dilanggar oleh pihak Belanda, karena yang tertulis dalam Traktat London mengenai pelarangan Belanda akan kedaulatan Aceh ternyata hanya sebagai bagian siasat Belanda dalam menduduki Aceh. Bahkan Belanda telah melanggar traktat London pasal 9 dan 10 (Isi Perjanjian London lihat dalam lampiran I). Bukti dari perbuatan Belanda yaitu dikuasainya beberapa daerah di wilayah Sumatra seperti Sibolga, Pedalaman Tapanuli dan Tanah Batak pada tahun 1830-an, sehingga dengan

adanya peristiwa tersebut maka kedudukan Aceh merasa sedikit terancam, karena daerah-daerah tersebut berdekatan dengan batas kesultanan Aceh.(Marwati Djoned, 1987 :243).

Bagi Inggris adanya Traktat London juga sangat menguntungkan, karena Wilayah Malaka yang menjadi miliknya akan terselamatkan dari penguasaan Belanda. Tetapi bagi pihak Belanda hal itu menjadi masalah, karena dalam pengakuan yang terpisah dari Traktat London Belanda harus membiarkan Aceh merdeka penuh, dan perjanjian tahun 1824 telah menghambat Belanda dalam menguasai Aceh. Sekaligus juga menguntungkan karena Belanda langsung berhadapan muka dengan kasultanan Aceh sehingga kesempatan itu dipergunakan oleh pihak Belanda untuk mengacau Aceh.

Di samping itu Belanda tidak kehabisan akal agar dapat menguasai Aceh, dengan dalih melarang perbudakan yang terjadi maka Belanda menangkap kapal Aceh yang berlayar melalui Nias dan menyita barang-barangnya. Lambat-laun Aceh merasa dirugikan oleh Belanda, tetapi Aceh tidak dapat berbuat apa-apa, berhubung dengan peralatan perangnya sendiri belum cukup kuat untuk bertindak menghadapi Belanda.

Bersamaan itu pula pada tahun 1825 antara pihak Belanda dengan Inggris telah dilaksanakan serah terima beberapa daerah seperti Bengkulu, Natal, dan Simbolga. Selain itu keruwetan memang ada pada pihak Belanda karena pada waktu itu Belanda sedang menghadapi 3 masalah yang cukup besar dan cukup menguras kas pemerintahan Belanda yaitu menghadapi Inggris, menghadapi Padri dan menghadapi Perang Diponegoro tahun 1825, sehingga beban yang dihadapi

Belanda tidaklah gampang. Di sini dapat dikatakan bahwa pelanggaran yang terjadi atas Aceh bermula dari pelanggaran Belanda terhadap kesepakatan Traktat Sumatera sehingga nanti akan menimbulkan berbagai perlawanan seperti adanya peristiwa Trumon.

Pelanggaran yang terjadi pada pasal 9 dan 10 (lihat lampiran I) yakni Belanda telah berani mendirikan benteng di Tanjung Kupiah (pertemuan antara kedua sungai, yakni Panai dan Bilah), sehingga membuat rakyat marah. Dari pihak rakyat sudah pernah mencoba menyerang benteng tersebut tetapi mengalami kegagalan dan Belanda sendiri tetap mempertahankan terus benteng itu.

Perlu diketahui pula bahwa Belanda pada tahun 1829 juga telah menguasai Barus, dan perlawanan rakyat Barus terhadap Aceh tidak mencapai hasil yang diharapkan. Setelah melanggar perjanjian Belanda-Inggris 1824, Belanda lalu melanjutkan agresinya untuk menguasai Aceh dan sebetulnya pelanggaran tersebut telah diperingatkan oleh gubernur Fullerton (Fullerton adalah gubernur saat itu).

Dengan adanya beberapa peristiwa yang terjadi rupa-rupanya ketidak-amanan perdagangan di Selat Malaka dirasakan juga oleh Inggris sebagai salah satu negara yang mengadakan hubungan perdagangan di wilayah tersebut. Pada tahun 1841, Sultan Aceh mengadakan kontrak dengan gubernur Jendral Inggris di Kalkuta untuk menjelaskan kesulitan yang dihadapi oleh Aceh karena adanya

gangguan dan provokasi dari Belanda. Akibat protes keras Inggris, Pos-pos Belanda di Sumatra Timur sejak tahun 1841 ditutup dan perluasan dihentikan.

Adanya campur tangan Inggris atas Aceh tersebut, maka Gubernur Jendral Belanda di Jakarta yaitu van Sweiten bertindak untuk mengikat raja-raja di Indonesia yang belum takluk dengan tujuan supaya tidak didahului oleh bangsa lain. Untuk melaksanakan maksud tersebut gubernur Belanda van Swieten yang berada di Padang memerintahkan untuk mulai menyelidiki Aceh. Dikirimlah utusan di Dubekart agar mengenal dan menelusuri aceh serta mengetahui seberapa besar kekuatan Aceh. Tugas Dubekart di Aceh adalah :

1. Memamerkan Bendera Belanda di pelabuhan-pelabuhan lada di Aceh.
2. Menyelesaikan setiap persengketaan antara rakyat dan para saudagar, tetapi dengan catatan semua itu harus atas inisiatif Sultan.

Dengan dikirimnya utusan terserbut maka gubernur Belanda van Swieten mengambil kesimpulan bahwa terlebih dahulu harus mengadakan hubungan persahabatan dengan Aceh. Pada tahun 1857 berangkatlah seorang sekretaris gubernur van Swieten yang bernama J.F. Nieuwenhuijen ke Aceh untuk mengirimkan surat pernyataan persahabatan. Selain itu tanda persahabatan tersebut ditandai dengan adanya upeti yaitu ; 6 bengkong perak, 12 tempat dian perak, 1 buah pedang bertahtakan emas, 1 buah pedang Palembang berikat suasa dan 100 peti dian. Tetapi bersamaan itu pula, disertai kepala seksi siasat F.G Hoffman, tujuannya adalah untuk mencaplok monopoli dagang kalau sudah tercapai persetujuan dalam perundingan persahabatan. Akhirnya disetujuiilah

adanya perundingan persahabatan antara Belanda dan Aceh pada tanggal 30 maret 1857 sebanyak 10 pasal (lihat dalam lampiran) (Muh.Said, 1961 :271-296). Dan disahkan oleh gubernur jendral dengan beslit No 7 Tanggal 9 Mei 1957 (Departemen P&k , 1977/1978 :95). Sebetulnya Belanda tidak bersungguh-sungguh mengadakan persahabatan dengan Aceh. Karena perjanjian tersebut hanya tipuan Belanda. Tidak lama setelah diratifikasi Belanda mencoba kembali untuk melanggarnya yaitu dengan mengadu domba antara kerajaan Aceh dengan Siak. Akhirnya pada tanggal 1 Februari 1958, Belanda memaksa Siak untuk memaksa suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah "lange Politik Contract". Pada tanggal 1 februari 1958.⁴⁾

Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan tersebut, maka untuk menguasai Aceh semakin terbuka dan bukti pelanggaran atas Aceh semakin jelas serta bukti pelanggaran atas perjanjian 1824 memperburuk kedudukan Aceh.

⁴⁾ Sehubungan perjanjian tersebut menghasilkan 36 pasal, tetapi diantara yang terpenting adalah :

- a. Bahwa Siak adalah bagian dari wilayah "Hindia Belanda" dan dibawah kedaulatan Belanda.
- b. Bahwa daerah wilayah Siak selain dari wilayahnya sendiri (yang berbatas ketenggara dengan kerajaan Kampar dan kesesebelah barat laut dengan kerajaan tanah putih),juga termasuk dan terdiri dari :
 1. Kerajaan Mandau
 2. Pekan Baru
 3. Tapung kanan dan Tapung Kiri
 4. Kerajaan di Sumatra Timur yaitu : tanah putih, Bamngko, Kubu, Percut, Perbaungan, Kualah, Asahan, Batubara, Bedagrai, Padang, Serdang, Perjut, Perbaungan, Deli, Langkat dan Tamiang.
 5. Pulau Bengkalis, Padang, Rantau dan pulau Raput serta pulau-pulau kecil yang masih wilayah masing-masing kerajaan tersebut diatas.

B. Traktat Sumatra Tahun 1871

Setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, kedudukan selat Malaka semakin sangat penting⁵⁾. Hal inilah yang mendorong Belanda untuk bertindak cepat untuk mengambil kekuasaan di seluruh Nusantara, sehingga dengan demikian Belanda mencari jalan agar dapat bekerjasama dengan Inggris, karena Belanda sadar bahwa jika saling bekerjasama maka untuk menguasai daerah Sumatra lebih mudah. Semenjak adanya pergantian gubernur Inggris di daerah jajahan dari tangan kolonel Cavarger ke tangan kolonel Sir Harry ST. George Ord pada bulan April 1867, sangatlah tak mudah untuk melakukan kerusuhan, hal ini disebabkan seluruh pasukan yang ada disiagakan penuh untuk mengamankan wilayah jajahan.

Tetapi pada tahun 1868, duta besar Inggris untuk Nederland yaitu laksamana E.A.J Harris mengajukan usul kepada pemerintahannya supaya meninjau kembali Traktat London 1824 . Karena perjanjian tersebut sudah tidak relevan lagi mengingat apa yang telah dilakukan Belanda atas Aceh. Kemudian pada bulan Oktober 1868 gubernur Ord sudah mengusulkan agar diizinkan untuk berunding dengan gubernur jendral Belanda Mijer di Betawi. Akhirnya keduanya setuju untuk meninjau ulang Traktat London 1824 tersebut.

Bagi Belanda hal itu tidak memberatkan karena dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pertemuan antara Mijer dan Ord merintis adanya beberapa pokok ketentuan yaitu :

⁵⁾ Bahwa dahulu sebelum dibukanya terusan Suez pelayaran dari Eropa ke Asia membutuhkan waktu yang lama karena harus berputar dahulu mengelilingi Tanjung Harapan baik (lewat jalur selatan) atau melalui Selat Kaibar di wilayah utara. Tetapi setelah dibangun terusan Suez di daerah Mesir, maka perjalanan menuju kedaratan Asia lebih mudah dan cepat, serta keselamatannya lebih terjamin.

- a. Soal bea cukai dan penghapusan perbedaan nilai pembayaran.
- b. Kesempatan bagi kapal berbendera Inggris untuk keluar masuk di perairan Nusantara.
- c. Kesempatan pembukaan konsul asing di Sumatra, di samping itu mengenai perluasan Belanda di Sumatra, termasuk Aceh (Muh Said, 1961 : 349).

Pokok-pokok pertemuan itu diserahkan kepada duta besar Harris dan terus ditindaklanjuti dengan tuntutan dari duta besar Harris agar Belanda mau memberi kebebasan untuk berniaga di Sumatra Timur, serupa dengan kebebasan warga Belanda di situ. Selain itu Belanda harus menyerahkan Pantai Guinea kepada Inggris. Tetapi permintaan Inggris ditolak oleh pihak Belanda.

Meskipun demikian nantinya keduanya akan mengikat perjanjian. Bersamaan itu pula komandan tinggi balatentara Hindia Belanda di Betawi memerintahkan komandan militer Belanda di Padang Kolonel WE Krossen untuk mengadakan penyelidikan atas Aceh dengan melakukan blokade dan intimidasi. Akhirnya hasil yang didapat bahwa orang Aceh telah memiliki senjata walaupun persenjataannya masih sederhana sekali, dan mempunyai pemimpin yang gagah berani serta jiwa patriotisme dan kefanatikan atas daerahnya yang mengelora (hal ini nanti akan dibahas dalam bab tersendiri). Di samping itu pada bulan November tahun 1870 Netscher⁶⁾, sudah melapor kepada pemerintah Belanda dengan menginformasikan adanya dukungan dari raja Trumon untuk bekerjasama

⁶⁾Elisa Netscher dahulu pernah berjasa karena telah berhasil menyelesaikan masalah Langkat dan Tamiang, dan pernah juga menjadi wakil Gubernur di Riau dan Di Padang. Selain itu juga pernah mengusulkan agar memasang mercusuar di tempat-tempat yang dirasa penting di pantai Aceh, demi keamanan serta keselamatan lalulintas kapal-kapal Belanda. Tetapi gagasan tersebut masih belum dapat dilaksanakan.

melawan Aceh.⁷⁾ Karena keadaan yang semakin mendesak maka akhirnya ide-ide yang pernah tercetus dahulu yaitu untuk memasang mercusuar di pantai-pantai Aceh serta keselamatan lalu lintas perdagangan dapat menjadi suatu kenyataan. Sehingga cita-cita antara Inggris-Belanda untuk saling bekerjasama menjadi terwujud. Dan hasil kesepakatan itulah yang menghasilkan Traktat Sumatra. Traktat Sumatra tersebut ditandatangani antara delegasi Belanda yaitu Menteri Luar negerinya Baron van Herwijen serta van Den Bosse, dengan delegasi Inggris Yaitu Duta besar Inggris E.A.J Harris. Adapun isi dari Traktat Sumatra antara lain :

- Pasal 1 : Inggris menghapuskan perhatiannya atas perluasan Belanda dimanapun di pulau sumatra, dan atas surat mengenai soal ini dalam nota yang sudah dipertukarkan antara wakil-wakil Belanda dan Inggris ketika membuat perjanjian 17 Maret 1824.
- Pasal 2 : Raja Belanda menerangkan bahwa didalam kerajaan Siak Sri Indapura dan wilayahnya sebagai yang telah dijelaskan dalam kontrak 1 Februari 1858 yang diikat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan tersebut, warga dan kapal Inggris untuk seterusnya mendapat hak-hak dan keuntungan sama dengan hak-hak dan keuntungan yang telah dan akan diberikan kepada warga dan kapal-kapal Belanda, dan kesamaan sedemikian dipunyai juga oleh warga dan kapal Inggris dibagian kerajaan lainnya yang manapun di palau Sumtera ini, yang sudah dijajah oleh Belanda dengan ketentuan bahwa warga Inggris dimaksud mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah Bealanda (Sumber Paul Vant Veer, 1985 : 17).

Traktat Sumatra tersebut diratifikasi oleh keduabelah pihak pada tanggal 1 November 1871, dan secara singkat maksud dari traktat tersebut adalah : Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan kekuasaannya di Sumatra

⁷⁾Trumon merupakan salah satu dari wilayah taklukan dari kasultanan Aceh yang mencoba membrontak untuk melepaskan diri dari kasultanan Aceh.

termasuk Aceh yang sebelum ini tidak bisa diganggu gugat (Marwati Djoned, 1985 : 242).

C. Usaha Belanda Menduduki Aceh

Dengan adanya berbagai perjanjian yang telah diratifikasi antara pihak Aceh dengan pihak Belanda maka secara langsung hal ini merupakan salah satu dari usaha Belanda untuk menguasai daerah atau wilayah jajahannya. Sebagai contoh Belanda selalu berusaha menang dalam berbagai perundingan dan mencari kelemahan dari hasil-hasil perundingan dan kepentingan Belanda sendiri seperti yang terjadi pada perjanjian atau Traktat London, dalam Traktat tersebut Belanda menemukan kelemahan-kelemahan yang akhirnya kelemahan dari pasal-pasal tersebut ada yang mengakibatkan Belanda dapat leluasa untuk mementingkan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan kepentingan lainnya, dalam hal ini adalah Inggris. Kemudian selain itu Belanda juga mengirimkan perutusan kepada pihak Aceh dengan tujuan utusan tersebut dapat memberikan informasi tentang Aceh kepada Belanda yang nantinya sangat berarti bagi Belanda dalam penaklukan atas Aceh.

Seperti yang telah di ketahui di atas bahwa Belanda mencoba mengadakan penyelidikan atas Aceh dan berusaha membina kembali hubungan dengan Aceh, agar disahkan adanya suatu perjanjian persahabatan. Pada tanggal 30 Maret 1857 perjanjian persahabatan antara Aceh dengan Belanda akhirnya dapat disahkan. Namun belum satu tahun perjanjian tersebut ditandatangani, Belanda telah melanggarnya yaitu dengan menyodorkan perjanjian Siak kepada Sultan

Ismail dari kerajaan Siak, sehingga menuntut Siak mengakui kedaulatan pemerintahan Belanda di Sumatra. Pada waktu itu juga sebenarnya sultan Mansyur Syah sudah menduga dengan segala rencana Belanda yang ingin memecah belah Aceh.⁸⁾ Karena selama Belanda berada di wilayahnya selalu menyusun siasat untuk menaklukan Aceh. Dengan demikian akhirnya Sultan mengambil tindakan pencegahan antara lain :

1. Mengirim Panglima Tengku Husein, tuanku Hasyim dan Panglima Teuku Muda Cut Latif Meureuu ke Daerah Sumatra timur, dengan tugas untuk memerintah dan mengamankan daerah Tamiang, Langkat, Deli dan serdang dari gangguan Belanda dengan membangun benteng pertahanan(dalam bahasa Aceh disebut Kuta).
2. Diadakan penarikan pajak untuk mengisi kas kerajaan dan menganjurkan penanaman lada yang sebesar-besarnya dengan tujuan agar perekonomian Aceh kembali seperti pada masa Iskandar Muda.
3. Mengadakan pengawasan yang ketat bagi semua pelabuhan di Aceh baik di pantai barat maupun di pantai timur untuk mencegah masuknya Belanda ke Aceh.
4. Meningkatkan hubungan diplomatik terutama dengan negara-negara Islam dan Perancis dalam rangka mencari bantuan senjata dan dukungan luar negeri (pusat Penelitian Sejarah dan budaya, 1877/1878 : 96-97).

⁸⁾ Sultan Masyur Syah berkuasa antara 1850-1871 dengan gelar Sultan Ala'ad-din Ibrahim Masyur Syah. Pada masa itu terjadi perselisihan dengan Sultan Sulaiman yang dibantu oleh pihak Belanda untuk menyingkirkan kedudukannya. Baru setelah kemenakannya meninggal Sultan Ibrahim dapat memerintah kembali dengan tenang.

Kesepakatan tersebut masih tetap dilanjutkan walaupun pada tahun 1870 terjadi pergantian sultan yang digantikan oleh anaknya .

Di lain pihak Belanda nampaknya semakin bernafsu untuk menjadikan Aceh sebagai bagian dari daerah jajahannya, terutama setelah pembukaan terusan Suez tahun 1869 yang telah menempatkan Aceh pada posisi yang lebih strategis dibandingkan dengan masa lalu. Dengan menyebarkan isu bahwa Belanda siap menyerang Aceh pada tahun 1865, maka secara demikian Belanda mengharapkan agar Aceh nantinya hanya akan memusatkan perhatiannya di wilayah Aceh sendiri tanpa menghiraukan wilayah taklukan Aceh sendiri. Siasat Belanda tersebut nampaknya berhasil, karena sultan semakin memperkuat batas-batas wilayah kasultanan Aceh. Akhirnya pihak Belanda menginstruksikan untuk mengepung daerah perairan Aceh, antara tanggal 15 Desember 1870 sampai 6 Januari 1871. Kapal perang Belanda Maas dan Waal telah mengadakan kepungan, sehingga dengan demikian menyebabkan perniagaan ekspor dan impor dari para saudagar Aceh praktis menjadi terhenti. Kemudian langkah Belanda selanjutnya dengan mengumpulkan bahan-bahan mengenai letak daerah yang strategis di Aceh serta kekuatan pertahanan Aceh dengan tujuan penyerangan ke Aceh nantinya berakibat Belanda dapat menguasai medan pertempuran, karena telah memiliki topograpis serta peta-peta wilayah Aceh. Selain itu usaha Belanda yang lain mengirimkan konsul untuk memperbaiki hubungan lagi antara Aceh dan Belanda, diutuslah Jhr.E.R. Kraijenhoff dan dibantu oleh seorang opsir pertanian A. von Kochritz yang berangkat dari Padang pada tanggal 7 september 1871 dan

tiba di ibukota Aceh. Untuk mempermudah komunikasi maka diutuslah Sidi Tahlil sebagai penghubung pihak aceh dengan Belanda. Akhirnya Kraijenhoff mendatangi istana sultan, sedangkan misi kedatangannya adalah untuk meminta jaminan perdagangan agar kapalnya dapat bebas keluar masuk di wilayah Aceh. Tetapi keinginan itu ditolak oleh sultan dan akhirnya memunculkan peristiwa “Gipsy”⁹⁾.

Pada akhirnya Belanda tetap ingin menumbangkan Aceh dengan segala cara. Pada tanggal 22 Mei 1872, Kraijenhoff kembali lagi ke Banda Aceh Darrusalam, dan membawa surat untuk mangkubumi Habib Abdu’r-Rahman, sekaligus dia akan mengadakan pengukuran kota, pantai, kampung, dan juga ibu kota Aceh serta laut dan sekitarnya secara sembunyi-sembunyi. Namun kedatangan yang kedua tersebut tidak di sambut oleh sultan, karena sultan sedang tidak ada di tempat. Sementara itu Panglima Muhammad Tibang selaku Syahbandar merasa jengkel karena sikap Belanda tersebut, dan Panglima Muh.Tibang juga menuduh Abdur’Rahman bersekongkol dengan Belanda. Di lain pihak Belanda mengakui persekongkolan tersebut sebab Habib Abdur’rahman sendiri memang pernah pergi memimpin perutusan yang terdiri dari Habib Abdur’Rahman sebagai ketua, Teuku Kali Malikul’L’Adil dan Teuku Meura’sa sebagai anggotanya untuk meghadap Gubernur Jendral Belanda di Jakarta, untuk

⁹⁾ Peristiwa Gipsy terjadi karena penolakan terhadap kapal Belanda yang ingin berlabuh ke Aceh sehingga Belanda mengirimkan kapal perangnya ‘Marnix’ untuk menakut-nakuti Aceh. Kapal Marnix tersebut diperkuat dengan persenjataan untuk mengejar kapal Aceh yang bernama ‘Gipsy’, dan oleh Belanda diseret ke pelabuhan Deli (Sumatra Timur) hal ini membuat cemas Aceh, karena Gipsy merupakan kapal satu-satunya milik Aceh yang dipergunakan untuk perantara antara Aceh dengan semenanjung Melayu.

meminta perdamaian. Rombongan tersebut diterima dan menginap di rumah dewan Hindia Belanda yaitu Levysohn Norman (Muhammad Said, 1961 : 365). dengan demikian Muh. Tibang memberikan informasi kepada Raja Aceh bahwa Belanda sering datang ke Aceh berkali-kali, karena ada persekongkolan antara Belanda dengan Habib Abdur'Rahman. Kejadian itu sebenarnya karena sikap persaingan antara Habib dengan Muh.Tibang untuk mengambil hati sultan dan mereka berdua akan saling menjatuhkan.

Pada tanggal 15 Mei 1872,akhirnya Belanda di bawah Kapten Kapal 'Ben Breil' kembali lagi dengan tujuan untuk mengakhiri peperangan di Deli yang merupakan salah satu wilayah taklukan Aceh. Dengan dalih tersebut kapal Ben Breil dilengkapi dengan persenjataan yang lebih canggih dan kuat. Akhirnya dari peperangan itulah nantinya akan terkenal dengan Batak Orlog (Perang batak)¹⁰⁾

Sedangkan pada bulan September 1872, Sultan Aceh mengirimkan delegasinya yaitu Muhammad Tibang ke Singapura dengan tujuan untuk membeli kapal serta peralatan perang tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh sultan, Tibang ternyata tidak kembali dan ternyata uang yang dibawanya telah habis untuk berfoya-foya, Karena sultan sudah sangat percaya kepada Tibang maka sultan memaafkan perbuatannya. Sebenarnya sultan dan panglima Tibang sendiri tidak ingin berperang dengan Belanda (Moh. Said, 1961 : 372).

¹⁰⁾ Dalam masalah perang batak, penulis tidak akan mengupas lebih jauh karena periode perang batak tersebut dapat ditemukan dalam buku mengenai perang batak yaitu Perang Gayo Alas karangan M. H. Gayo.

Akhirnya pada 13 Desember 1872 - 25 Januari 1873 dikirimlah panglima Tibang ke Riau oleh sultan untuk menyampaikan 3 surat yang pertama yaitu ditujukan kepada residen Schiff yang isinya agar Belanda tidak mengganggu Aceh, sedangkan surat yang kedua dan ketiga ditujukan kepada Konsul Perancis dan Amerika di Singapura, tetapi utusan sultan tersebut tidak disambut dengan ramah oleh residen Schiff karena ia sendiri telah menganggap bahwa Aceh telah takluk padanya, selain untuk menyampaikan surat tersebut sultan juga ingin mengetahui alasan Belanda menyerbu kapal gipsy miliknya dan masalah tersebut agar dijelaskan oleh residen Schiff sendiri. Kemudian setelah selesai Muh Tibang akan pergi ke konsul Perancis dan Amerika untuk minta bantuan. Namun dalam perjalanan ternyata Tibang singgah ke tempat Mohamad Arifin yaitu salah satu kaki tangan Belanda untuk membicarakan masalah yang baru saja diselesaikan dengan pihak Belanda. Dalam pembicaraan itu Tibang juga minta pertimbangan kepada Mohamad Arifin bahwa ia juga diutus sultan untuk menyampaikan surat kepada konsul Perancis dan Amerika di Singapura sehubungan dengan kegiatan Belanda yang ada di Aceh, dan Moh Arifin menyarankan supaya surat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Akibatnya Belanda marah karena Aceh telah bekerjasama dengan pihak lain untuk melawan Belanda. dan yang lebih parah Aceh dituduh melanggar perjanjian perdamaian tanggal 30 Maret 1857 yang telah disepakati. Secara bersamaan di daerah Riau, Belanda mengalami pergantian pemimpin dari Gubernur Jendral P. Mijer di gantikan oleh JHR. Loudon, sedangkan panglima tentara yang semula dipegang oleh Jendral Kroesen digantikan oleh Jendral

Whitton. Akhirnya awal Februari 1873 Menteri jajahan van de putte memberikan ultimatum kepada Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda di Aceh atau memilih perang melawan Belanda.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perang Aceh.

Sebab-sebab terjadinya perang Aceh secara langsung dan merupakan faktor yang sangat penting serta patut kita ketahui yaitu :

1. keadaan keuangan Belanda yang merosot akibat peperangan.

yaitu perang Diponegoro dan adanya pemberontakan rakyat Belgia terhadap Belanda. Perang Diponegoro mengakibatkan Belanda harus mengurus kas negaranya, ditambah lagi dengan keinginan rakyat Belgia untuk memisahkan diri dari negara Belanda dan Belgia ingin menjadi negara yang merdeka. Sehingga dari adanya dua peristiwa tersebut di atas Belanda mengalami kerugian yang cukup besar, untuk mengembalikan keadaan perekonomiannya yang merosot, maka Belanda meningkatkan hasil ekspor rempah-rempah. Selain itu di Jawa juga masih melanjutkan "culturstelsel"¹¹⁾ guna memulihkan perekonomian Belanda (Sartono Kartodirjo jilid II, 1992 : 13-17). Untuk melaksanakan tanam paksa tersebut pemerintah Belanda memerlukan tanah yang luas dan subur. Maka dalam hal ini pihak Belanda bekerjasama dengan Inggris menjalin kerjasama untuk memonopoli daerah jajahan. Pada saat itu antara Belanda dengan Inggris

¹¹⁾ Culturstelsel merupakan sistem yang diciptakan oleh Van Den Bosch untuk memperbaiki kekacauan-kekacauan sosial, sistem ini mendatangkan keuntungan dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan adat kebiasaan tradisional lokal. Hakekat dari sistem tersebut bahwa penduduk diwajibkan membayar pajak tanah sekaligus harus menyediakan sejumlah hasil bumi untuk ekspor. Pada umumnya penduduk harus menyerahkan 2/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai penggantinya 1/5 dari waktu kerjanya dalam satu tahun.



sudah terjalin hubungan yang tercantum dalam Traktat London (1824), dalam kesepakatan tersebut disetujui bahwa Sumatera di bagi dua wilayah jajahan kecuali Aceh, sedangkan pada waktu itu Inggris sudah mempunyai wilayah taklukan yaitu di Malaka. Bagi Belanda sendiri dengan adanya Traktat London membawa angin segar untuk terus mengembangkan sifat imperialismenya di Sumatera dalam hal ini Aceh yang diincar oleh Belanda. Untuk yang kedua kalinya Inggris dan Belanda mengadakan perundingan kembali disebut Traktat Sumatera (1871). Dalam Traktat Sumatera disepakati bahwa Sumatera menjadi jajahan Belanda Termasuk wilayah Aceh (Aceh dalam Traktat London merupakan negara yang merdeka dan otonoin), sedangkan Inggris oleh Belanda diberi daerah pengganti yaitu teluk Guinea (Hazil, 1952 : 7-8).

Setelah Traktat Sumatera diratifikasi oleh Inggris dan Belanda, hal ini membuat rakyat Aceh menjadi marah, dikarenakan pada saat perundingan tersebut diadakan rakyat Aceh tidak diikutsertakan di dalamnya.

2. Adanya pelanggaran Belanda dalam Traktat London (1824) dan Traktat Sumatera (1871).

Pelanggaran pihak Belanda dalam Traktat London yaitu mengenai pendirian kongsi dagang hasil bumi (lihat lampiran I pasal 9&10) Belanda mulai memperluas wilayahnya sampai keperbatasan Aceh padahal dalam Traktat London hal ini sungguh dilarang. Ditambah lagi pelanggaran Traktat Sumatera 1871 yang telah diratifikasi oleh Belanda. Keadaan yang demikian membuat Belanda semakin semena-mena dan leluasa terhadap Sumatera hal inilah yang sangat ditentang oleh rakyat Aceh karena Belanda semata-mata saja berkuasa atas

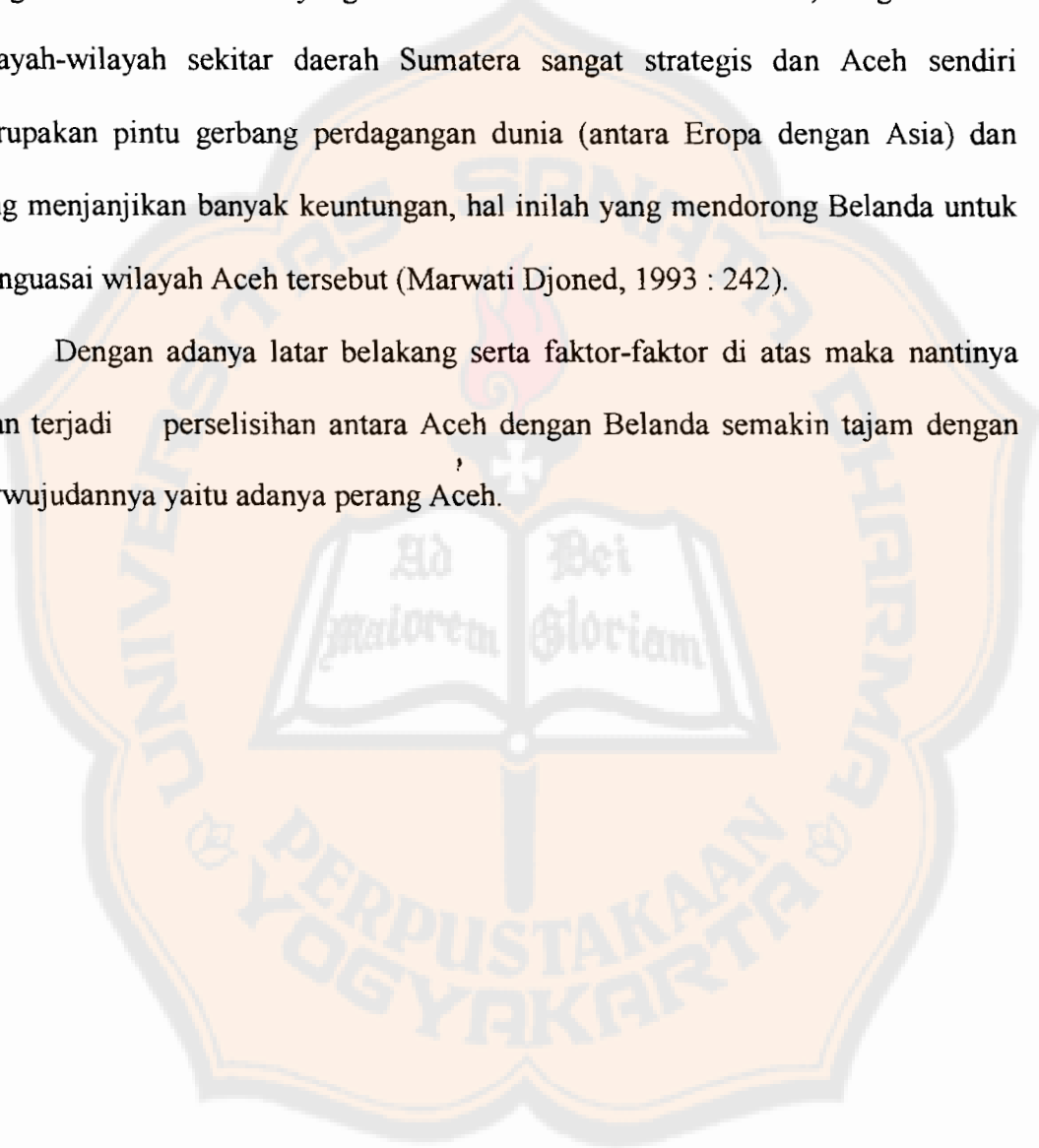
Aceh. Selain itu pihak Aceh sendiri merasa jengkel karena Aceh yang selama ini diperebutkan tidak pernah diikutsertakan dalam perjanjian tersebut kecuali melihat hasil dari perjanjian yang telah diratifikasi yang berdampak buruk bagi kesultanan Aceh sendiri. Selain itu juga kemarahan Belanda terhadap Aceh dikarenakan Aceh mengadakan kontak dengan bangsa-bangsa lain seperti Amerika, Italia, dan Turki untuk meminta dukungan dan bantuan dalam menghadapi Belanda (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977/1978 : 122).

3. Di bukanya terusan Suez tahun 1869.

Sebelum dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, pelayaran antara Eropa dengan Asia untuk mencari barang-barang dagangan memerlukan waktu yang cukup lama. Padahal barang-barang dari Eropa kebanyakan didapatkan dari para pedagang Asia, karena waktu yang ditempuh para pedagang Eropa cukup lama (melalui jalur selatan, yang harus melingkari Benua Afrika, Lewat Tjujung Harapan yang merupakan jalur yang berbahaya bagi pelayaran), sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari barang dagangan. Dengan demikian terjadilah kelangkaan barang-barang dagangan dan harga barang dagangan menjadi mahal di kawasan Eropa. Setelah dibukanya terusan Suez di daerah Mesir tahun 1869, memudahkan pelayaran untuk mencari daerah perdagangan di Asia, karena mereka (para pedagang Eropa) tidak harus berputar tetapi lewat Mesir melalui terusan Suez. Dibukanya terusan Suez, kedudukan daerah-daerah di Asia khususnya di Sumatera mempunyai warna lain, atau dapat dikatakan bahwa pelayaran antara Eropa dan Asia semakin ramai dan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera seperti di Malaka semakin dipadati oleh para pedagang

dari berbagai negara. Dengan demikian pemasukan keuangan wilayah Aceh maupun Malaka semakin besar. Karena menguntungkan maka Belanda ingin menguasai daerah-daerah yang ada di Sumatera termasuk Aceh, dengan alasan wilayah-wilayah sekitar daerah Sumatera sangat strategis dan Aceh sendiri merupakan pintu gerbang perdagangan dunia (antara Eropa dengan Asia) dan yang menjanjikan banyak keuntungan, hal inilah yang mendorong Belanda untuk menguasai wilayah Aceh tersebut (Marwati Djoned, 1993 : 242).

Dengan adanya latar belakang serta faktor-faktor di atas maka nantinya akan terjadi perselisihan antara Aceh dengan Belanda semakin tajam dengan perwujudannya yaitu adanya perang Aceh.



**BAB IV
JALANNYA PERANG ACEH**

Dalam peperangan antara Aceh dan Belanda hingga ada ultimatum atau pernyataan perang pada awal Februari 1873, yang diterima resmi oleh Kasultanan Aceh pada tanggal 26 Maret 1873, mulailah meletus perang antara Kasultanan Aceh dengan pihak Belanda.

Perang tersebut dapat disebut juga dengan istilah perang rakyat karena melibatkan seluruh rakyat Aceh, yang secara aktif membantu jalannya perang (SartonoKartodirjo Jilid II, 1992:386). Pada Bab III terdahulu telah dijelaskan mengenai sebab atau faktor yang mendorong terjadinya Perang Aceh. Sedangkan pada Bab IV ini penulis akan memaparkan jalannya perang Aceh dengan membahas strategi yang digunakan oleh pihak Belanda maupun Aceh. Selain itu dalam Perang Aceh juga melibatkan para pejuang wanita Aceh yang turut berperan dalam mengobarkan semangat perlawanan.

A. Strategi Perang Aceh

Setelah dijelaskan di atas mengenai sebab-sabab Perang Aceh sehingga perang tersebut meletus di wilayah Aceh, maka untuk menghadapi perang Aceh yang terus berkecamuk itu pihak Aceh maupun pihak Belanda mempunyai strategi atau taktik untuk menyelesaikan konflik peperangan. Perang Aceh tersebut sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga strategi ataupun taktik yang diterapkan dalam perlawanan sangatlah bermacam-macam. Mengenai strategi atau taktik berperang dari masing-masing pihak akan dibahas dalam sub bab tersendiri. Adapun strategi yang dilancarkan baik oleh Aceh maupun Belanda sebagai berikut :

1. Strategi Perang Dari Pihak Belanda

Dalam menghadapi atau mensikapi peperangan tersebut Belanda lebih banyak mencoba mengirimkan pasukan-pasukan, yang kemudian pengiriman pasukan tersebut dikenal dengan istilah ekspedisi yaitu pengiriman tentara untuk menyerang atau menaklukan musuh di suatu daerah yang jauh letaknya. Ekspedisi yang pertama dipimpin oleh Mayor Jendral Kohler pada tanggal 5 April 1873, dengan kekuatan \pm 3000 orang bala tentara yang kemudian menyerbu pantai sebelah barat Kotaraja. Penyerbuan tersebut berhasil menduduki benteng Aceh, kemudian mulai merambat dan menyerbu Masjid Baitturahman. Setelah menyerbu Masjid Baitturahman, mereka berusaha untuk menghancurkan dan membakarnya pada tanggal 14 April 1873. Tetapi karena kuatnya pasukan Aceh maka pasukan Belanda dapat dipukul mundur dan akhirnya ekspedisi yang pertama ditarik kembali, dengan harapan menunggu bala bantuan yang ada di Batavia. Dalam ekspedisi yang pertama itu juga Belanda kehilangan seorang pemimpin yang besar dan gagah berani yaitu Mayor Jendral Kohler yang tewas tertembak dalam pertempuran antara pasukan Belanda dan Pasukan Aceh. Dengan kematian Kohler maka pasukan Belanda mulai kehilangan semangatnya dalam perang tersebut.

Kegagalan ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Mayor Jendral Kohler menjadi pengalaman pertama bagi pihak Belanda untuk mencari strategi yang pas untuk melawan rakyat Aceh. Maka untuk itu dikirimlah ekspedisi yang kedua di bawah pimpinan Jendral van Swieten pada bulan November 1873. Di bawah kepemimpinan van Swieten ekspedisi yang kedua tersebut lebih berhati-hati, karena kegagalan dalam ekspedisi yang pertama merupakan cambuk untuk melangkah

dalam menyusun strategi yang lebih baik dan waktunya akan lebih tepat. Hal itu disebabkan karena pelaksanaannya kurang diperhitungkan dan tergesa-gesa, perlengkapan yang kurang memadai, dan tidak ada perencanaan yang matang. Dengan demikian Jendral van Swieten pertama kalinya mencoba untuk berdiplomasi terlebih dahulu kepada para pemimpin daerah terlebih-lebih kepada Sultan Aceh, untuk mencari kesepakatan bekerja sama dan berdamai dengan pihak Belanda. Dari hasil yang didapat ada beberapa daerah taklukan Kasultanan di Aceh yang bersedia tunduk kepada Belanda (tetapi hal ini nantinya juga merupakan salah satu strategi atau taktik yang di laksanakan dari daerah di wilayah Aceh sendiri). Karena diplomasi membutuhkan waktu yang amat panjang, maka kekerasanlah yang pantas diterapkan atas rakyat Aceh. Sehingga pengiriman kekuatan bala tentara yang dibawanya lebih besar dari ekspedisi sebelumnya yaitu $\pm 13\ 000$ orang. Hal ini mengingat kegagalan yang pernah dialami pada saat ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Mayor Jendral Kohler (Sartono Kartodirjo jilid II, 1992:387).

Pasukan dari Jendral van Swieten berhasil menyerbu ke keraton dan menguasainya sehingga mengakibatkan Sultan melarikan diri dan mengungsi. Karena tanpa perlawanan sama sekali akhirnya keraton dapat dikuasai secara penuh oleh pihak Belanda. Dalam pelarian tersebut akhirnya Sultan meninggal dunia disebabkan terkena penyakit kolera, sedangkan para pengikutnya mengungsi semakin jauh ke pedalaman. Tindak lanjut dari Jendral van Swieten setelah menguasai Aceh yaitu menjalankan sistem pasifikasi¹²⁾.

¹²⁾ Sistem pasifikasi merupakan usaha pengamanan yang bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi peperangan (Purwodarminto, 1990:652).

Dengan sistem pasifikasi tersebut Belanda berusaha menguasai dan mengamankan lembah sungai Aceh dan Aceh Besar, dengan mendirikan benteng-benteng sebagai pos penjagaan untuk mengawasi daerah sekitarnya. Setelah istana Sultan jatuh pada tanggal 14 Januari 1874 maka secara tidak langsung Belanda merasa bahwa rakyat Aceh telah ditaklukkannya. Untuk itu Jendral van Swieten kembali ke Batavia karena menganggap Aceh telah aman.

Ternyata ekspedisi tersebut tidak hanya sampai di situ melainkan masih disusul dengan ekspedisi berikutnya, dan yang dikirim adalah J.L.J.H. Pell. Pengiriman J.L.J.H. Pell tersebut untuk meneruskan program yang telah dilaksanakan oleh Jendral van Swieten yaitu melanjutkan pelaksanaan sistem pasifikasi. Benteng-benteng yang telah didirikan oleh Jendral van Swieten tersebut ternyata membutuhkan banyak tentara sehingga seluruh kekuatan tentara yang ada harus dikerahkan. Sedangkan rencana dari J.L.J.H. Pell sendiri adalah membuat benteng dari Kutaraja sebagai pusatnya yang berjarak ± 9 km. Masing-masing pos tersebut dilengkapi dengan logistik yang harus dikirim seminggu sekali. Tetapi penerapan strategi dengan pembuatan benteng-benteng mempunyai kelemahan yaitu pemusatan kepemimpinan akan terpecah-pecah, karena letak benteng yang satu dengan yang lain saling berjauhan yang mengakibatkan rakyat Aceh dapat melakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda saat Belanda lengah. Pada bulan februari 1876 J.L.J.H Pell tewas akibat penyerbuan rakyat Aceh ke dalam benteng Belanda. Kemudian pos-pos dan benteng Belanda dapat direbut oleh rakyat Aceh serta sebagian dapat dikuasai pada tahun 1877.

Dengan meninggalnya J.L.J.H Pell, maka ekspedisi selanjutnya digantikan oleh jendral van Der Heyden, dengan membawa \pm 3000 pasukan serta 10 kapal perang dan dilengkapi dengan persenjataan pada tanggal 8 Agustus 1877 (Marwati Djoned, 1993 : 252). Kapal-kapal tersebut mendarat di Pengilit Baroh. Ekspedisi yang dikirim tersebut bertujuan untuk menyerang mukim-mukim rakyat Aceh. Penyerbuan Belanda terhadap mukim-mukim dihadapi oleh para panglima mukim dengan strategi perang gerilya..

Semakin lama Belanda merasakan serangan-serangan dari pejuang Aceh semakin meningkat, untuk itu Belanda mulai mengubah strategi perangnya. Melalui sidang Staten General ¹³⁾ pada tanggal 16- 17 Juni 1884 maka dicetuskanlah adanya sistem Lini Konsentrasi atau dengan kata lain Konsentrasi Stellsel. Konsentrasi Stellsel tersebut mulai dibangun pada tanggal 20 Agustus 1884, di mana pelaksanaannya memerlukan daerah seluas \pm 50 Km dan Kotaraja sebagai pusat pengendaliannya. Kotaraja tersebut dikelilingi oleh 16 lini dalam hal ini adalah benteng, jarak antara benteng yang satu ke benteng yang lain \pm 2 Km, dan dari Kotaraja sendiri berjarak \pm 5 Km. Adapun bentuknya merupakan setengah lingkaran dengan bagian yang terbuka menghadap ke lautan lepas. Di samping itu di bagian luar dari benteng-benteng tersebut terdapat semak belukar yang telah ditebang dan membentuk tanah lapang yang luas yang mempunyai lebar \pm 1 Km yang dipakai sebagai pengaman terhadap serangan-serangan dari musuh khususnya dalam hal ini adalah rakyat Aceh. Selain itu benteng-benteng tersebut dipagari atau dikelilingi

¹³⁾ Staten General merupakan parlemen yang ada pada saat itu yang terdiri dari Eerste kanen dan Tweede kanen dan mereka inilah yang berwenang mengambil putusan terhadap wilayah atau daerah-daerah jajahan yang telah dikuasai oleh pihak Belanda.

dengan pagar kayu yang runcing, dan di setiap pojoknya diletakkan meriam yang siap dibunyikan jika musuh datang. Kemudian untuk menjalin hubungan antar benteng tersebut dibangunlah trem-trem sebagai alat transportasi.

Sedangkan di daerah pantai Aceh dan daerah-daerah taklukan Belanda ditempatkan adanya pos-pos penjagaan, sebagai contoh seperti pos di daerah Idi dan Singli di Pantai Timur Laut dan di Meulobuh di Pantai Barat Aceh (Paul Van Veer, 1995:125-126). Pembentukan lini tersebut memakan waktu setengah tahun, dan selama pembangunan benteng-benteng tersebut menelan banyak korban, karena mendapat serbuan dari pihak Aceh. Sedangkan pelaksanaan sistem Konsentrasi Stellsel tersebut mulai bulan Maret 1885.

Strategi yang berdasarkan Konsentrasi Stellsel ternyata memberi banyak peluang para pejuang Aceh untuk mengadakan serangan-serangan secara bergerilya, sehingga para pejuang Aceh mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam kota pada malam hari. Selain dari itu para pejuang Aceh mempunyai anggapan bahwa Belanda adalah seorang pengecut dan penakut. Hal ini dikarenakan sistem Konsentrasi Stellsel tidak lagi mengandalkan patroli ke daerah-daerah baik pada waktu siang maupun malam hari. Dengan demikian secara langsung dapat merendahkan martabat yang telah lama mereka bangun dengan susah payah pada masa perang Aceh dan sebelumnya.

Pada tahun 1890 Gubernur Deidenkoff waktu itu berusaha mendekati pada kaum bangsawan atau para Ulebalang untuk bekerjasama dalam mengatasi konflik yang berlangsung, dan usul tersebut diterima oleh para Ulebalang dimana waktu itu dipimpin oleh Teuku Umar yang akhirnya mau berpihak pada Belanda sehingga

beberapa daerah mukim dapat ditundukan juga. Sebagai contoh yaitu mukim XXII, XXV, XXVI (Sartono Kartodirjo jilid II, 1992:389). Tetapi akhirnya Teuku Umar membelot dari pihak musuh. Sehingga hal ini memaksa Belanda untuk mengirimkan ekspedisinya kembali.

Akhirnya pada tahun 1891 dikirimlah seorang utusan yang mempunyai panggilan Abdul Gaffar yang tidak lain dia adalah Dr. Snouck Hurgronye dalam rangka untuk mencari jalan penyelesaian perang yang lebih efektif yaitu dengan mencari tahu tentang letak rahasia kekuatan pasukan Aceh. Mulailah pada tanggal 16 Juli 1891 sampai 4 Februari 1892, Dr. Snouck Hurgronye dapat tinggal di Aceh dan berbaur bersama rakyat Aceh, sehingga berhasil memperoleh kepercayaan para ulama Aceh serta rakyat Aceh sendiri, Dr. Snouck Hurgronye berhasil belajar bahasa dan kebudayaan rakyat Aceh.

Pada tanggal 23 Mei 1892 Dr. Snouck Hurgronye dapat menyampaikan laporan kepada Gubernur Jendral Pijnacker Hordijk mengenai situasi serta keadaan rakyat Aceh. Dari laporan yang disampaikan oleh Dr. Snouck Hurgronye tersebut, pemerintah Belanda mendapat petunjuk bahwa satu-satunya jalan yang baik untuk ditempuh dan akan membawa hasil adalah dengan jalan memecah belah kekuatan yang ada dalam masyarakat Aceh, khususnya dengan mengadu domba para Ulubalang yang memimpin daerah-daerah di wilayah Aceh. (Paul vant Neer, 1995:152-165).

Menjelang akhir abad ke-19 perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda tidak semakin pudar, bahkan hampir \pm 20 tahun lamanya perlawanan terhadap Belanda masih tetap berkobar, walaupun bersifat kedaerahan.

Jika ditelusuri memang tidak sedikit korban yang gugur serta banyaknya kerugian harta maupun benda yang tidak ternilai harganya. Demikian juga di pihak musuh, jumlah korban yang jatuh juga mencapai ribuan jumlahnya. Padahal Belanda mengira bahwa dalam waktu yang lama wilayah Aceh yang strategis letaknya pada masa itu, menjelang abad ke-20 semakin kelihatan merosot dan mengalami kehancuran ternyata masih mempunyai semangat juang yang tinggi, yang sanggup menggagalkan ekspedisi serta strategi yang dilakukan oleh pihak Belanda.

2. Strategi Perang Dari Pihak Aceh

Dalam menghadapi peperangan, pihak Aceh sendiri juga mempunyai taktik yang berbeda dari yang dilakukan oleh Belanda. Secara keseluruhan Strategi atau taktik yang digunakan oleh para pejuang Aceh mempunyai pola yang sama di masing-masing daerah yaitu menggunakan perang gerilya yang bersifat rahasia. Dalam strategi gerilya pasukan Aceh mengadakan penyerangan pada malam hari. Siasat gerilya dalam perang Aceh diterapkan oleh pejuang Aceh seperti; Panglima Polim, Teuku Umar, Cik Ditiro dan para pengikutnya. Penyerangan dengan taktik gerilya sangat menguntungkan bagi pihak Aceh karena:

1. Para pejuang Aceh dapat menguasai medan pertempuran, sehingga mereka lebih banyak tahu keadaan dan situasi seluruh wilayah Aceh, sedangkan dari pihak Belanda hanya mampu bertahan dalam benteng yang telah dibangunnya.
2. Apabila pihak Belanda mengadakan serangan di suatu daerah tertentu, maka para pejuang Aceh yang berada saat itu akan menghilang dan bersembunyi, lalu akan

muncul kembali di tempat lain dengan mengadakan serangan-serangan yang mendadak di daerah Belanda (Marwati Djoned, 1993 : 244-251).

Daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda, yang sering mendapat serangan dari para pejuang Aceh adalah Leungbata, Ketapang Dua, Bukit Sirih, Kuala Gigieng, Tibang, serta daerah Tunga (Marwati Djoned, 1993:251). Selain itu dengan siasat gerilya rakyat serta pejuang Aceh mampu menembus Lini Konsentrasi dengan jalan menyerang pos-pos Belanda serta benteng yang melingkari antara Kreung Bata, Lambaroh, Uleekarang dan Kileng. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh para pejuang Aceh membuahkan hasil yaitu dengan tewasnya Mayor Jendral Kohler serta J.L.J.H. Pell di medan pertempuran.

Selain dengan menggunakan siasat Gerilya para pejuang Aceh juga melaksanakan strategi lainnya yaitu dengan cara penghianatan dengan pernyataan bahwa mereka takluk atau tunduk kepada Belanda, tetapi akhirnya setelah mereka berhasil mengelabui Belanda dan menyusun kekuatan, mereka mulai membelot dan melepaskan diri dari Belanda. Taktik atau strategi semacam itu pernah dilakukan oleh Habib Abdul Rahman yang pernah menyerahkan dirinya kepada Belanda pada 13 Oktober 1878 pada saat mengalami kekalahan di daerah Longi. Selain Habib Abdul Rahmaan hal itu juga pernah dilakukan oleh Teuku Muda Baid selaku kepala Mukim VIII. Tetapi mereka akhirnya kembali dan memihak pada rakyatnya dengan membawa persenjataan curian. Disisi lain juga penghianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar terhadap pemerintahan Belanda. Teuku Umar pernah menyatakan takluk dan tunduk kepda Belanda pada masa gubernur Deijkerhoff. Untuk menghormati Teuku Umar maka Gubernur Deijkerhoff mengangkatnya sebagai

Panglima perang dengan gelar Teuku Johan Pahlawan, dan ia dipercayai untuk membawahi pasukan serta dibekali dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian akhirnya persenjataan yang dipercayakan padanya disembunyikan oleh Teuku Umar sendiri dan dibagikan kepada para pejuang Aceh secara sembunyi-sembunyi. Setelah dirasa memungkinkan Teuku Umar kembali pada para pejuang Aceh untuk bergabung kembali bersama-sama rakyat Aceh dan dibantu oleh Cut Nya Dien istrinya memimpin pemberontakan dan mengadakan perlawanan kepada Belanda.

Di samping dengan mengadakan kontak langsung lewat peperangan, dari pihak Aceh juga mengobarkan adanya perang Sabil atau Sahid¹⁴⁾. Perang Sabil atau Jihad merupakan perang suci atau di dalam penganut agama Islam merupakan perang yang diwajibkan dan diikuti oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali untuk membela tanah air dan agamanya. Begitu pula dengan rakyat Aceh yang sebagian besar menganut agama Islam hal itu wajib untuk melaksanakannya. Semangat perang Sabil selalu ditanamkan oleh para ulama kepada rakyat Aceh dalam peperangan untuk mempertahankan wilayah tanah airnya (A. Hasimy, 1971:19).

Dalam perang sabil juga dikenal dengan istilah mati syahid, yaitu pejuang atau pahlawan yang mati dalam perjuangan atau dalam perang tidak akan mati secara sia-

¹⁴⁾ Perang Sabil atau Jihad mempunyai idiologi, yang dilambangkan dalam bendera Aceh, dengan warna dasar pada bendera merah, dan di atasnya terdapat gambar sebilah pedang serta sebuah bulatan seperti bulan purnama yang berwarna putih. Pada bulatan di sudut kanan atas bagian luar bendera, ada tulisan dengan huruf Arab, yang kalau diterjemahkan menjadi "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Singa Allah Ta Allah yang perkasa, Ali Bin Ai Tolib, semoga Allah memuliakan wajahnya, panggilan Ali orang yang dapat melahirkan berbagai keajaiban, anda akan mendapatkan pertolongan dalam kesusahan, bagi tiap-tiap kegelisahan dan duka cita akan lenyap, dengan berkat kenabianmu ya Muhammad dan dengan kepemimpinanmu ya Ali, tiada pemuda [yang paling perkasa] selain Ali tidak ada pedang [yang paling tajam] selain pedang Zulfikar, makhluk yang paling baik dari Tuhan yang Maha Pemurah ! Orang-orang yang paling besar diantara orang-orang mukmin, wahai Dia yang Maha Besar lagi Maha Agung, wahai Dia tiada Tuhan melainkan Dia. Dengan bendera tersebut dapat menyemangati para pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Dan di setiap peperangan bendera itu selalu dibawa dan dikibarkan.

sia tetapi akan masuk surga karena telah membela tanah air dan bangsanya. Semangat perang Sabil mampu mengobarkan jiwa dan semangat para pejuang Aceh sehingga tidak gentar dalam menghadapi Belanda (Hazil, 1952:33-36).

Dengan berbagai macam strategi rakyat Aceh mencoba untuk berhadapan dengan pihak Belanda, walaupun demikian akibat dari perlawanan tersebut juga menimbulkan korban jiwa maupun harta.

B. Peranan Wanita Dalam Perang Aceh

Di dalam Perang Aceh yang memakan waktu yang cukup lama tidak akan pernah melupakan peranan dari kaum wanita (seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Teuku Fakinah, dan Pocut Baren) yang turut berjuang melawan musuh (Belanda) saat berlangsungnya peperangan antara tahun 1873-1896. Untuk lebih jelasnya kita melihat satu persatu para tokoh wanita yang pernah berperan besar dalam perjuangan.

1. Cut Nyak Dien

Wanita yang bernama Cut Nya Dien adalah keturunan bangsawan Nanta Seutia yang memerintah di daerah mukim VI atau kampung Lumpadang, yang beribukota di kampung Pekan Bada . Setelah menjelang dewasa Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Tengku Ibrahim anak dari Teuku Oedjong Aroen dari Lamnga di daerah pulau Wei (M.H. Szekely, 1945 :20-34). Mereka menikah pada tahun 1858 di Lamnga. Setelah terjadi ekspedisi Belanda pada tahun 1873 Cut Nya Dien bersama dengan suaminya turut berjuang melawan Belanda. Bentuk perjuangan Cut Nyak

Dien adalah mengajar para wanita mengenai cara mendidik bayi agar kelak dapat menjadi seorang anak yang berguna bagi bangsa dan negaranya, serta menanamkan semangat kepahlawanan dan kesatria melalui syair-syair yang dibuatnya (Ismail Suny, 1980 : 297-299). Cut Nyak Dien juga diberi kuasa untuk memerintah mukim VI, yang merupakan warisan dari ayahnya Nanta Seutia, karena ayahnya tidak sanggup lagi untuk memimpin pemerintahan (merasa sudah tua), sehingga sudah waktunya melimpahkan tanggung jawabnya kepada anak tunggalnya.

Pada waktu Belanda mengepung mukim VI di Lumpandang tanggal 29 Juni 1878, Suami Cut Nyak Dien (yaitu Tengku Ibrahim) tewas dalam pertempuran. Sepeninggal suaminya tidak membuat dirinya (Cut Nya Dien) menjadi putus asa, melainkan mempunyai perasaan bangga karena suaminya mati syahid dalam mempertahankan bangsa dan tanah airnya juga agamannya.

Bersamaan itu pula datanglah Teuku Umar untuk menemui Nanta Seutia yang tidak lain adalah paman dari Teuku Umar. Untuk mempererat persaudaraan akhirnya Nanta Seutia mengusulkan agar Teuku Umar mau mengambil Cut Nyak Dien sebagai istrinya, selain itu pernikahan mereka juga bertujuan untuk menyatukan mukim-mukim yang ada. Kemudian Cut Nyak Dien bersama-sama dengan Teuku Umar kembali menyusun siasat dalam menghadapi Belanda. Pada waktu berhadapan dengan Belanda Teuku Umar merasa kewalahan dan akhirnya mau berdamai dengan Belanda, sehingga Teuku Umar bersedia tunduk kepada Belanda. Sepeninggal Teuku Umar, perlawanan rakyat Aceh melemah, karena merasa bahwa Teuku Umar telah mengkhianati bangsanya sendiri. Tetapi akhirnya Cut Nyak Dien kembali membujuk suaminya agar segera kembali dan bergabung

bersama dengan rakyat Aceh. Tunduknya Teuku Umar merupakan salah satu siasat dari Teuku Umar untuk menyembunyikan persenjataan Belanda. Dengan hasil tersebut Teuku Umar bersama rakyat mengadakan pemberontakan dan perlawanan pada pihak Belanda. Akan tetapi nasib Teuku Umar tidak jauh berbeda dengan Teuku Ibrahim, karena Teuku Umar juga meninggal di medan pertempuran.

Dengan kematian Teuku Umar, Cut Nya Dien bersumpah bahwa : “Demi Allah selama pahlawan Aceh masih hidup, peperangan tetap kuteruskan guna kepentingan agama, kemerdekaan, bangsa dan negara” (Paul Vant Veer, 1985 : 185). Sumpah tersebut dilakukannya dalam perlawanan terhadap Belanda, ± 16 tahun lamanya Cut Nyak Dien melakukan gerilya sampai di tengah hutan belantara. Suatu ketika pada tanggal 6 November 1905 pasukan Belanda menyerbu persembunyian Cut Nyak Dien dan dia ditangkap oleh Belanda, yang akhirnya diasingkan ke Sumedang di Jawa Barat sampai ajal menjemputnya.

2. Cut Mutia

Cut Mutia lahir sekitar tahun 1870 di daerah Pase, Cut Mutia merupakan anak dari pasangan Tengku Daud dan Cut Muhammad. Mereka (Cut Muhammad dan Tengku Daud) sepasang pejuang dari daerah Pase yang selalu mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Setelah menginjak dewasa Cut Mutia menikah dengan Tengku Muhammad. Setelah mereka menikah pindah ke Lhoksumawe. Tidak lama mereka tinggal di sana Tengku Muhammad ditangkap oleh pihak Belanda dengan tuduhan pembunuhan terhadap serdadu Belanda, lalu Tengku Muhammad dihukum mati dengan ditembak. Tetapi sebelum dilaksanakan hukuman tersebut Tengku Muhammad berpesan kepada istrinya agar sepeninggalnya

nanti ia (Cut Mutia) rela menikah dengan Pang Nangro serta melanjutkan perjuangan untuk membela kehormatan bangsa dan kesucian agama. Dan amanat dari Tengku Muhammad akhirnya dilaksanakan juga.

Para pejuang Aceh yang dipimpin oleh Pangeran Nangro beserta istrinya Cut Mutia berjuang dengan pedang dan rencong, ditambah dengan sedikit senapan yang telah usang. Dengan strategi gerilya mereka mencari patroli Belanda yang ada di kampung-kampung. Pangeran Nangro sendiri akhirnya mati dalam medan pertempuran. Perjuangan tidak hanya berhenti sampai di sini tetapi masih tetap diteruskan oleh Cut Mutia. Cut Mutia sendiri akhirnya juga mengalami nasib yang sama dengan para suaminya yaitu mati syahid dalam pertempuran pada tanggal 25 Oktober 1910.

3. Teuku Fakinah

Teuku Fakinah yang sehari-harinya sering dipanggil dengan Teuku Faki yang lahir pada tahun 1856 merupakan anak dari Teuku Datuk Muhammad. Teuku Datuk Muhammad adalah seorang pejabat pada masa Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Kampung Lambunot (mukim Lamkarak VII). Setelah dewasa Teuku Fakinah dinikahkan dengan Teuku Ahmad dari Anevek-Ale. Pada masa ekspedisi yang pertama, daerah Lamkarak mendapat serangan dari Belanda. Untuk menghadapi serangan tersebut Tengku Ahmed bersama Teuku Fakinah ikut dalam kalifah VII mukim XII di daerah /wilayah Baet pimpinan Panglima Polim untuk mempertahankan pantai Cermin. Namun bersamaan itu pula gugurlah Teuku Ahmed.

Sepeinggal suaminya Teuku Faki mendirikan badan amal yang terdiri dari para janda serta para wanita yang rela terlibat dalam gerakan sosial tersebut. Badan amal tersebut mendapat sambutan dari rakyat luas, sehingga masyarakat berperan serta dalam pengumpulan sumbangan yang berupa uang maupun beras.

Pada saat perang sedang berlangsung Teuku Faki dengan badan amalnya mendukung dengan menyiapkan perbekalan. Selain itu Teuku Faki dengan semangat menjunjung tinggi agama serta merta melibatkan dirinya dalam pertempuran dengan jalan membangun semacam benteng yang sederhana. Di bawah komando Teuku Faki pernah ada 4 buah kuta atau benteng yang berhasil didirikannya, seperti :

1. Kuta Lamsayun yang dipimpin oleh Teuku M. Saleh.
2. Kuta Cot Bak Kiat dipimpin oleh Teuku Pang Amal.
3. Kuta Cot Weu oleh Teuku Faki sendiri.
4. Kuta Bak Base oleh Habib Lhong (Ismail Suny, 1980 : 300).

Kemudian Teuku Faki diangkat menjadi Panglima perang. Karena tugas panglima perang yang disandangnya terasa berat, maka Teuku Faki memerlukan pendamping. Lalu Teuku Faki menikah dengan Tengku Ruyak Badai yang berasal dari kampung Lampidi. Dengan adanya perkawinan tersebut bertambahlah semangat untuk mengumpulkan perlengkapan persenjataan serta logistik untuk keperluan para pengikutnya. Teuku Fakinah meninggal bukan karena gugur dalam peperangan tetapi karena usia yang telah usur. Ia wafat pada usia 82 tahun.

4. Pocut Baren

Ia lahir ± 1880, ia anak dari T.Cut Amat seorang hulubalang di tangkap. Setelah dewasa ia kawin dengan Keujnoeb Gome Ulebalang. Pocut baren pernah memegang peranan sebagai panglima perang, dan memimpin rakyat di Aceh Barat. Dalam perlawanan yang sengit ini banyak serdadu - serdadu Belanda yang menjadi korban peperangan. Padahal perlengkapan persenjataan masih sederhana yaitu menggunakan kelewang dan tombak. Pertempuran tersebut dipimpin oleh dirinya sendiri. Pada pertempuran tersebut Pocut Baren terkena peluru sehingga serangan dari Pocut Baren terpaksa di hentikan dan setelah sembuh Pocut Baren ditahan di Kuta Raja.

Jika melihat sepak terjang dari kaum wanita pada saat itu, mereka telah menyadari arti perjuangan dan mempertahankan tanah airnya. Walaupun demikian pocut Baren tahu akibat yang ditimbulkan seperti mati dalam pertempuran maupun ditawan oleh pihak musuh.

C. Dampak Perang Aceh

Konflik yang telah terjadi antara Belanda dengan Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 - 1896 atau dikatakan dari masa ekspedisi sampai dengan terjadi konflik senjata memang berakibat buruk bagi keduanya. Sampai pada tahun 1896 Gubernur Jendral yang berkuasa sampai saat itu adalah Deidenkoff, masih terus berusaha menghancurkan Aceh, dan rakyat Aceh tetap menyambutnya dengan perlawanan yang tak kalah hebatnya. Sebetulnya konflik tersebut memakan waktu yang sangat lama dan berhenti setelah Jepang datang ± 1942, dan dalam rentang waktu yang lama itu juga banyak gubernur jendral yang silih berganti berkuasa di Hindia Belanda (lihat lampiran).

Telah dikatakan setiap konflik atau peperangan akan menimbulkan dampak atau akibat. Begitu pula dengan Belanda, yang memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak sedikit jatuh korban baik harta benda maupun manusia. Untuk itulah maka penulis akan membatasi akibat atau dampak perang Aceh dari rentang waktu 1873 - 1896. Adapun dampak yang ditimbulkan kedua belah pihak yaitu.

1. Akibat / dampak perang Aceh bagi Belanda.

Akibat /dampak tersebut tidak sebanding karena Belanda mengalami kerugian yang cukup besar. Dari segi positifnya dapat dijelaskan bahwa : Belanda mendapat keuntungan di bidang politiknya seperti ketika Belanda mampu mendapatkan dan menguasai beberapa daerah di wilayah Aceh (lihat peta dalam lampiran), sekitar tahun 1873-1896.

Dilihat dari sisi negatifnya, merupakan kerugian akibat terjadinya perang yang terlalu lama yang ditimbulkannya. Adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan adalah :

a. Pada Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dari tahun 1873-1896 Belanda mengalami banyak kekalahan berupa persenjataan yang dapat dirampas oleh rakyat Aceh ketika para pejuang Aceh yaitu baik Teuku Umar maupun Habib Abdul Rahman ataupun yang lainnya ketika menyembunyikan persenjataan untuk keperluan bagi rakyat Aceh sendiri (Hazil, 1995 : 94). Penyerbuan pos-pos Belanda serta hancurnya benteng-benteng yang pernah didirikannya seperti dalam Konsentrasi Stellsel serta meninggalnya para pemimpin yang pernah melakukan ekspedisi. Selain pemimpin ekspedisi yang meninggal, juga para serdadu yang cukup banyak yang meninggal dari tahun ketahun

yang semakin meningkat. Hal ini dapat digambarkan mengenai banyaknya jumlah serdadu yang tewas yaitu ; sampai pada tahun 1876 jumlah serdadu Belanda yang tewas mencapai \pm 1500 orang, dan yang mengalami sakit karena kejangkitan suatu penyakit maupun terluka akibat peperangan \pm 7599 orang. Serdadu yang sakit serta luka harus segera diangkut dan di bawa ke Padang, dikarenakan kota Padang pada saat itu merupakan salah satu perwakilan pemerintahan Belanda yang terdekat atau dibawa ke Jawa jika klinik atau Rumah sakit dirasa kurang lengkap persediaan obat-obatannya. Mereka di sana akan diobati penyakitnya ataupun lukanya. (Paul Vant Veer, 1985 : 89). Jika dilihat secara keseluruhannya korban pasukan Belanda dalam perang Aceh sampai tahun 1896 baik yang tewas maupun luka-luka mencapai ratusan ribu jiwa¹⁶⁾ (Muh.Said, 1961 : 507).

b. Pada Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi Belanda juga mengalami banyak kerugian. Dikarenakan kas negeri Belanda sendiri terkuras habis diperuntukan pembiayaan perang selama itu. Selain terkuras untuk biaya perang disebabkan karena macetnya ekspor dan import akibat keadaan yang tidak stabil pada saat perang.

c. Pada Bidang Sosial

Di bidang kesehatan kerugian yang nampak adalah timbulnya wabah penyakit kolera dan beri-beri disebabkan langkanya bahan makanan. Karena terjadi peperangan yang cukup lama maka distribusi makanan menjadi terhambat sehingga

¹⁶⁾ Sebenarnya kerugian Belanda baik secara materiil ataupun sepirtuil lebih dari keterangan diatas. Tetapi data kongkrit yang didapat oleh penulis hanya menyebutkan seperti yang diatas. Karena sampai tahun 1877 baik yang tewas maupun luka-luka sudah mencapai \pm 10 000 jiwa.

rakyat menderita kelaparan. Wabahnya ini juga banyak menjangkiti para serdadu Belanda.

2. Akibat Perang Aceh bagi Aceh

Dampak / akibat yang ditimbulkan sebelum perang Aceh tidak jauh berbeda dari Belanda. Tetapi kerugian dari pihak Aceh dapat dikatakan jauh lebih besar dibandingkan kerugian pihak Belanda. Adapun dari sisi positifnya dapat disebutkan bahwa :

- a. Rakyat Aceh semakin mencintai tanah airnya dan agamanya. Dan dengan adanya perang sabil dan jihad masyarakat dapat mempersingkat penguasaan Belanda atas Aceh (walaupun dengan susah payah perlawanan yang tidak putus-putus) sampai akhir menjelang kedatangan Jepang tahun 1942.
- b. Rakyat Aceh sendiri tidak hanya mengenal senjata tradisional seperti : tombak, rencong, dan kelewang, tetapi dapat mengenal persenjataan yang lebih modern seperti pistol dan meriam serta berhasil menggunakannya (Paul Vant Veer, 1985:84).

Selain dari pada itu pihak Aceh mengalami kerugian yang cukup besar di berbagai bidang antara lain :

a. Bidang Politik

Sudah jelas bahwa sebagian daerah Aceh menjadi daerah kekuasaan Belanda dan tidak mempunyai kebebasan lagi.

b. Bidang Ekonomi

Pada bidang ini rakyat merasakan adanya ketidakadilan. karena apa yang telah dikelola masyarakat Aceh menjadi milik Belanda dan keuntungan dari hasil bumi merupakan hak milik Belanda.

c. Bidang sosial

Kerugian pada bidang sosial bagi rakyat Aceh sangatlah berarti karena kerugian tersebut sangat jelas dirasakan, baik kerugian jiwa maupun harta benda. Kerugaian jiwa meliputi kematian yang disebabkan oleh perang, dengan gugurnya para pejuang Aceh, serta pemerkosaan dan penganiyaan terhadap wanita. Selain itu munculnya penyakit kolera dan beri-beri karena kelaparan. kemudian kerugian harta yang diderita rakyat Aceh adalah hancurnya perkampungan penduduk \pm 400-500 kampung pada tahun 1874-1880, yang habis di bakar oleh Belanda (Paul Vant Veer, 1985:96). Dengan demikian dampak dari perang Aceh dan Belanda dirasa lebih banyak menderita kerugiannya .

**BAB V
KESIMPULAN**

A. Kesimpulan

1. Wilayah Aceh merupakan daerah yang diperintah oleh seorang Sultan atau Raja, yang mempunyai kedudukan sebagai penguasa pemerintahan tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya Sultan dibantu oleh para wasir atau menteri negara, dan masing-masing menteri membawahi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu dalam struktur masyarakat Aceh sendiri dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : golongan Raja, golongan Bangsawan, golongan masyarakat biasa. golongan Raja adalah Sultan sebagai penguasa tertinggi, kemudian golongan Bangsawan yang terdiri dari keturunan Raja serta para pejabat istana, dan yang terakhir adalah golongan masyarakat biasa yang merupakan rakyat kebanyakan.
2. Dalam latar belakang perang Aceh yang terjadi antara masa ekspedisi sampai masa kekerasan 1873 - 1896 dengan munculnya peristiwa-peristiwa yang mengharuskan terjadi penandatanganan surat-surat perjanjian. Adapun perjanjian-perjanjian yang pernah diratifikasi dan yang menimbulkan bencana bagi Aceh adalah Traktat London 1824, kemudian Traktat Sumatera 1871. Traktat London 1824 merupakan perjanjian antara pihak Inggris dengan Belanda yang isinya mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya ditandatangani, Belanda memperoleh kembali jajahannya yang selama perang direbut oleh Inggris, Serta Belanda

tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan di Aceh. Tetapi pihak Belanda melanggar kesepakatan yang akhirnya menimbulkan adanya perjanjian baru yang disebut dengan Traktat Sumatera 1871. Traktat Sumatera 1871 ditandatangani antara Inggris dengan Belanda yang intinya Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan kekuasaannya di seluruh Sumatera, termasuk Aceh yang selama ini tidak boleh diganggu gugat kedaulatannya. Kemudian pembukaan terusan Suez 1869, mempermudah hubungan antara Asia dengan Eropa, sehingga Aceh memiliki posisi yang sangat strategis bagi lalu lintas pelayaran menuju selat Malaka. Oleh sebab itu peristiwa-peristiwa tersebut menjadi faktor pemicu pecahnya perang Aceh.

3. Dalam menghadapi peperangan di Aceh, masing-masing pihak baik Aceh maupun Belanda dalam mensikapi/menyelesaikan peperangan tersebut menggunakan strategi atau taktik berperang yang dianggap tepat sebagai jalan mengalahkan musuh. Dari pihak Belanda strategi yang dipergunakan melalui pengiriman pasukan yang kemudian dikenal dengan istilah ekspedisi sampai dengan dibentuknya Konsentrasi Stellsel atau Lini Konsentrasi. Sedangkan dari pihak Aceh menggunakan siasat gerilya dan melancarkan siasat penghianatan yang dilakukan oleh para pejuang Aceh yang banyak merugikan pihak Belanda.

Dalam perang Aceh sendiri tidak terlepas dari peranan kaum wanita yang turut berperang melawan Belanda seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Cut Fakinah, dan Pocut Bareh. Mereka dengan sekuat tenaga mencurahkan

kemampuannya yang ada agar Aceh dapat terbebas dari belenggu penjajahan. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari adanya penjajahan tersebut sangat menyengsarakan rakyat seperti perang Aceh yang terjadi antara 1873 -1896.



Daftar Pustaka

- A. Hasjmy, 1975. *Iskandar Muda Meu Kuta Alam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Algadri, Hamid, 1984. *Politik Belanda terhadap Islam keturunan Arab*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Anthony Reid. 1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Audrey, R, 1990. *Pergolakan daerah pada awal kemerdekaan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Garfiti.
- Deny Lombard, 1986. *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Departemen Pdan K, 1983. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.
- Hadari Nawawi, 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gama University Press, Yogyakarta.
- Hasimy, A. 1971. *Hikayat Perang Sabi menjiwai perang Aceh bagi Belanda*, Banda Aceh, Pustaka Farabx.
- Hasan Saleh, 1992. *Mengapa Aceh Bergolak, bertarung untuk kepentingan bangsa dan bersambung kepentingan daerah*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti.
- Hazil, 1952. *Teuku Umar dan Cut Nya Dien sepasang pahlawan perang Aceh*, Amsterdam.
- Ibrahim Alfian. T. 1976. *Emas, Kafir, dan Maut, catatan singkat mengenai pengalaman dua orang Perancis di Aceh pada akhir abad ke XIX*, Aceh, Pusat latihan Penelitian Ilmu-Ilmu sosial.
- _____. 1973. *Sejarah Singkat Perang di Aceh*, A. Sartono Kartodirjo (ed. *Sejarah perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme*), Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI
- I Gusti Ngurah Agung 1992. *Metode Penelitian Sosial Pengertian dan Pemakaian Praktis*, Jakarta, PT Gramedia.

- Jacob, Ismail. 1960. *Tengku Tji Dik Tiro (Muhammad Saman) Pahlawan Besar Dalam Perang Aceh (1881-1891)*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang.
- Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto, 1987. *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV*, Jakarta, Balai Pustaka.
- M. H. Gayo. 1983. *Perang Gayo Alas melawan kolonialis Belanda*, Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Moedjanto, G. 1989. *Indonesia Abad ke 20 jilid I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, Yogyakarta, Kanisius.
- Mohammad Said, 1961. *Aceh Sepanjang Abad*, Medan, Penerbit pengarang sendiri.
- Nazaruddin Sjamsudin, 1990. *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti.
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977/1978, *Sejarah Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta.
- Sartono Kartodirjo, 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru :1500-1900 : dari emporium sampai Imperium jilid I*, Jakarta, PT Gramedia.
- Sartono Kartodirjo, 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional : dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta, PT Gramedia
- Suny Ismail, 1980. *Bunga ampai tentang Aceh*, Jakarta, Bharata Karya Aksara.
- Tengku Lukman, 1986. *Sari Sejarah Serdang I*, Jakarta, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Sejarah.
- Thamrin, MZ. 1975. *Pengaruh Pendidikan Islam pada rakyat Aceh Dalam Menentang Penjajahan Belanda*, Skripsi Sarjana Keguruan, Universitas Syah Kuala.
- Vant Veer Paul, 1985. *Perang Aceh : kisah kegagalan Snouck hurgronye*, Jakarta, PT Tempit.
- Zainuddin, H.M. 1961. *Tarich Aceh dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar Muda.
- _____. 1966. *Srikandi Aceh*, Medan Pustaka Iskandar Muda.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

ISI TRAKTAT LONDON TAHUN 1824

- Pasal 1 :** Kedua belah pihak berjanji memberikan kesempatan berniaga bagi warganegara keduanya diwilayah masing-masing di kepulauan Timor dan didaratan India, dan Srilanka, sebagai warga yang diutamakan dengan arti bahwa warga negara masing-masing akan mematuhi hukum setempat.
- Pasal 2 :** Warga dan kapal dari salah satu bangsa yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan timur tidak akan membayar lebih tinggi dari selipat dari bea cukai keluar masuk pelabuhan Timur yang dibayar oleh warga penguasanya.
- Pasal 3 :** Kedua pihak berjanji tidak akan mengikat perjanjian dengan salah satu negara di perairan Timur yang mungkin akan mewujudkannya tertutupnya kesempatan berniaga dari pihak lain, dan jika perjanjian ada, dianggap batal.
- Pasal 4 :** Raja Inggris dan Belanda berjanji akan memerintahkan kepada pembesar masing-masing, baik sipil maupun militer bahkan juga kepada kapal-kapal barang masing-masing mengenai kebebasan bertindak sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, 2, dan 3 supaya mereka patuhi dan tidaklah boleh sekali-kali terhambat perhubungan antara rakyat di kepulauan Timur dengan pelabuhan-pelabuhan dari pemerintah keduanya. Demikian pula tidak boleh menghambat

perhubungan antara rakyat keduanya dengan pelabuhan-pelabuhan dari negara-negara raja di Indonesia yang lain.

Pasal 5 : Kedua raja Inggris dan Belanda berjanji akan membasmi bajak laut dengan giat, tidak diperbolehkan melindungi kapal bajak laut. Tidak dibolehkan diberi kesempatan barang-barang dirampok, dimiliki, dibawa, disimpan maupun diperjual belikan oleh kapal-kapal begitu.

Pasal 6 : Telah disetujui bahwa masing-masing pemerintah melarang kepada pembesar dan agen masing-masing untuk mendirikan kantor baru di kepulauan Timur, sebelum di beri kuasa oleh masing-masing pemerintahannya di Eropa.

Pasal 7 : Untuk melaksanakan keinginan pasal 1,2,3 dan 4, monopoli di pulau-pulau Maluku dan kekuasaannya Ambon, Banda dan Ternate, kecuali pulau sekitarnya, akan dihapuskan pada waktu yang dianggap oleh pemerintah Belanda keduanya sudah mengizinkan. Dan bila mana perdagangan diperkenankan kepada negeri-negeri lain selain negeri asli sendiri, maka warga Inggris akan mendapat kesempatan yang serupa kepadanya dengan lainnya.

Pasal 8 : Raja Belanda menyerahkan kepada Raja Inggris segala edstablimentnya di tanah besar India dan melepaskan segala hak istimewa yang diperolehnya dari pemikiran ini.

Pasal 9 : Loji Inggris di Fort Marlborough dan segala miliknya di pulau Sumatra dengan ini diserahkan kepada raja Belanda. Raja Inggris berjanji

bahwa dipulau ini tidak akan di bangun kantor-kantor inggris . Tidak akan di bikin perjanjian dengan siapapun dari raja-raja dan kepala bumi putra di situ untuk berada dibawah kuasa Inggris.

Pasal 10 : Kota dan benteng malaka dan sekitarnya dengan ini diserahkan kepada Inggris. Raja Belanda berjanji atas namanya dan atas nama rakyatnya, tidak akan membuka kantor di bagian semenanjung Malaka atau membuat perjanjian dengan raja-raja bumiputra atau negara yang ada disemenanjung itu.

Pasal 11: Raja Inggris melepaskan segala minatnya terhadap didudukinya pulau Belitung dan wilayahnya oleh agen pemerintah Belanda.

Pasal 12 : Raja Belanda melepaskan segala minatnya terhadap didudukinya pulau Singapura oleh rakyat Inggris. Disamping itu raja Inggris berjanji tidak akan mendirikan kantor-kantornya di pulau-pulau Karimun atau pualau Batam, Bintang, Lingga atau pulau-pulau lain yang terletak di sebelah selatan Singapura dan tidak akan membuat perjanjian dengan kepala disitu supaya takluk dibawah kuasa Inggris.

Pasal 13 : Segala jajahan milik establisment yang tersebut dipasal-pasal diatas haruslah diserahkan kepada pembesar negara yang bersangkutan selambatnya tanggal 17 Maret 1825. Pendudukan tersebut berada dalam keadaan ketika perjanjian ini di umumkan di India, tapi tidak boleh ada tuntutan, dari siapa kepada siapapun, alat-alat atau suatu bentuk keperluannya yang ditinggalkan oleh negara-negara yang

menyerahkan, baik mengenai perolehannya yang ditinggal maupun mengenai hutangnya dari bentuk apapun.

Pasal 14 : Segala penduduk dari negeri-negeri dimana terjadi pertukaran ini selama tempo 6 tahun terhitung sesudah perjanjian ini diratifikasi mendapat kebebasannya untuk menentukan bagaimana diperbuatnya dengan harta bendanya ataupun untuk memindahkannya dengan tidak boleh ada rintangan siapapun untuk melakukannya.

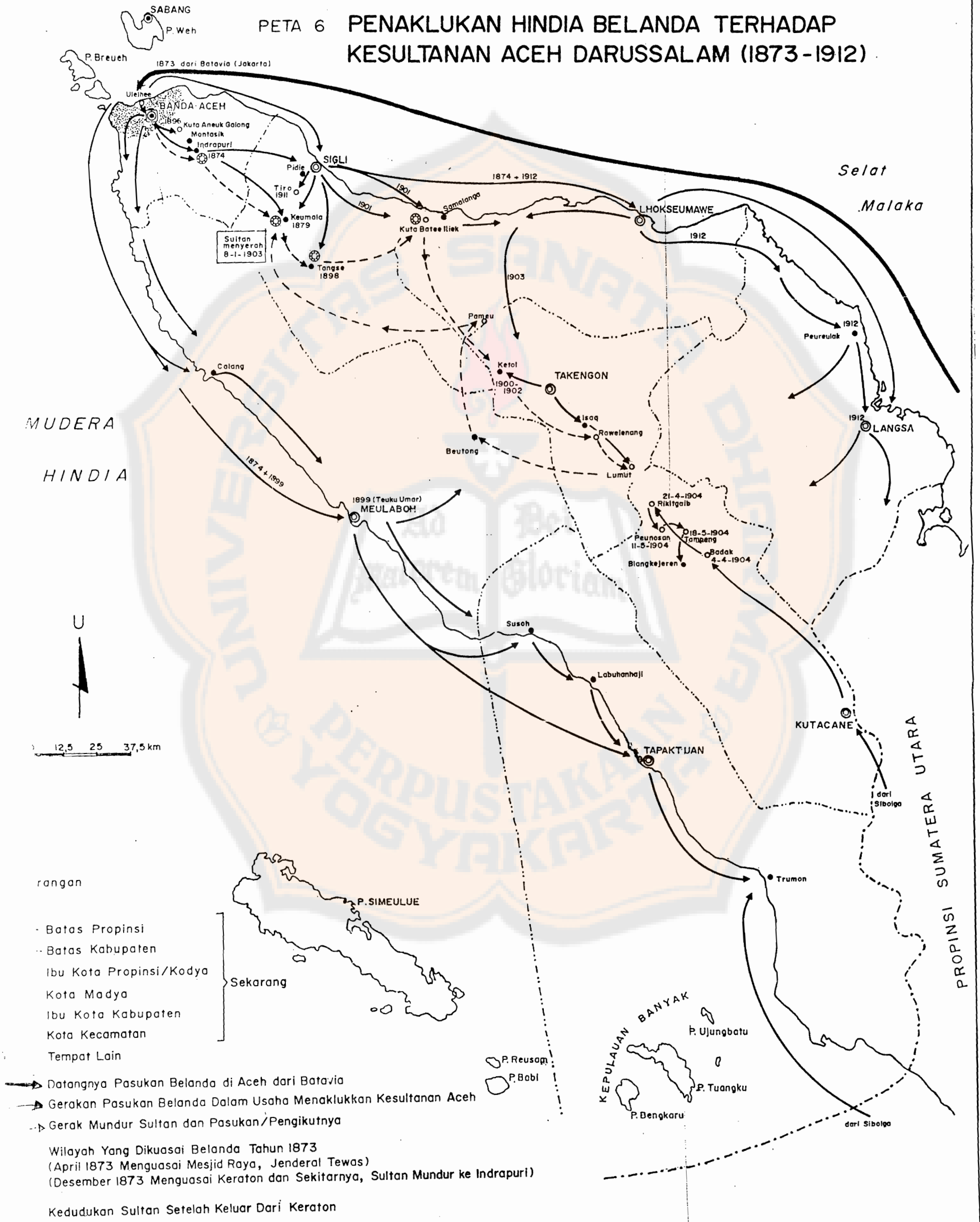
Pasal 15 : Kedua pihak berjanji tidak akan menyerahkan kepada negara lain atau establishmentnya yang dimaksud dengan pasal 8, 9, 11, dan 12. Jika diantara tempat dimaksud hendak ditinggalkan oleh salah satu pihak, hak-haknya dengan serta merta pindah ketangan pihak lain.

Pasal 16 : Telah disetujui bahwa segala perhitungan dan pembagian yang tumbuh dari pemulangan Jawa dan establishment lainnya kepada pembesar raja Belanda di India Timur, baikpun yang merupakan persoalan dari sesuatu konvensi di Jawa pada tanggal 24 Juni 1817, telah diikat oleh kedua bangsa maupun segala apa yang lain, tidak akan merupakan dakwa dakwi lagi, kecuali mengenai pembayaran sebanyak £ 100. 000 Inggris dari pihak Belanda, yang dilakukan di London sebelum akhir tahun 1825.

Pasal 17 : Perjanjian ini akan diratifikasi dan peratifikasian akan dipertukarkan di London tiga bulan sesudah tanggal ini atau jika mungkin lebih cepat lagi

Sumber : Muhammad Said, 1961. *Aceh Sepanjang Abad*, Medan, Penerbit dan pengarang sendiri, hal 253.

PETA 6 PENAKLUKAN HINDIA BELANDA TERHADAP KESULTANAN ACEH DARUSSALAM (1873-1912)



Muctarudin Ibrahim, triana Wulandari, Suhardi, 1990. Peta Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nama-nama Para pejabat/Gouverneur Yang pernah memerintah di Aceh.			
No.	N a m a	Jabatan	Tahun
1.	: Nieuwenhuijzen	: Komisaris Pemerintah Un- tuk Aceh	: 1873—Ap- ril 1873
2.	: J.H.R. Kohler	: Panglima Agresi — I	: 1873—Ap- ril 1873
3.	: J. Van Swieten	: Komisaris Pemerintah/ Panglima Agresi — II	: 1873—Ap- ril 1874
4.	: J.L.J.H. Pel	: Militair en Civiele Bevelheb- ber	: 1874—1876
5.	: J.B. Th. Wiggres Van Ker- hem	: Militair en Civiele Bevelheb- ber	: 1876
6.	: A.J.F. Diemont	: Militair en Civiele Bevelheb- ber	: 1876—1877
7.	: K. Van der Heijden	: Wakil sda tahun 1878 men- jadi Civiele en Militair Gou- verneur.	: 1877—1881
8.	: A. Pruijs Van der Hoeven	: Civiele en Militair Gouver- neur	: 1881—1882
9.	: P.F. Laging Tobias	: sda	: 1882—1884
10.	: H. Demmeni	: sda	: 1884—1886
11.	: H.K.F. Van Teijn	: sda	: 1886—1891
12.	: F. Pompe Van Meerder- voort	: sda	: 1891—1892
13.	: C. Deijkerhoff	: Civiele Gouverneur	: 1892—1896
14.	: Letnan Jenderal J.—A. Vetter	: Commandant der Leger/ Gouvernement Commis- saris	: 1896—(Ap- ril) Juli
15.	: J.J.K. de Moulin	: Civiele en Militair Gouver- neur	: 1896 (Juli).
16.	: JW. Stemfoort	: Wakil Civiele en Militair Gouverneur	: 1896 (Juli - Oktober)
17.	: C.P.J. Van Vliet	: Civiele en Militair Gouver- neur	: 1896—1898
18.	: J.B. Van Heutsz	: sda	: 1898—1904
19.	: Jhr. J.C. Van der Wijck	: sda	: 1904—1905
20.	: C.E. Van Daalen	: sda	: 1905—1908
21.	: H.N.A. Swart	: sda	: 1908—1918
22.	: A.G. H. Van Sluijs	: Civiele Gouverneur	: 1918—1923
23.	: A.M. Hans	: sda	: 1923—1926
24.	: Goedhart	: sda	: 1926—1930
25.	: Philips	: sda	: 1930—1933
26.	: A. Ph. Van Aken	: sda	: 1933—1936
27.	: J. Jongejans	: Wakil (fd) Gouverneur (Resident)	: 1936—1940
28.	: J. Pauw	: Resident Aceh	: 1940—1942

Proyek Penelitian Sejarah dan Budaya, 1997/1998, Daerah Istimewa Aceh,
Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nama Sultan-Sultan yang memerintah di Kerajaan Aceh

1. Sultan Ali Muhayat Syah ± 1514 – 1528.
2. Sultan Salahuddin, anak laki-laki dari 1, 1528 – 1537.
3. Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahhar, anak laki-laki dari 1, 1537 – 1568.
4. Sultan Ali Riayat Syah atau Sultan Husein, anak laki-laki dari nomor 3, 1568 – 1575.
5. Sultan Muda, anak laki-laki dari nomor 4, menjadi Sultan hanya atas nama sebagai anak, berumur 4 bulan dan meninggal 7 bulan kemudian.
6. Sultan Sri Alam, anak laki-laki dari nomor 3. sebagai abang dari nomor 4.
7. Sultan zainal Abidin, anak laki-laki dari abang dari nomor 6, jadi cucu dari nomor 3.
8. Sultan Alaudin dari Perak atau Sultan Mansyur, anak laki-laki dari Sultan Ahmad dari Perak, 1577 – 1586.
9. Sultan Ali Riayat Syah atau Raja Bujung, ± 1586 – 1588.
10. Sultan Alaudin Riayat Syah, anak laki-laki dari Firman Syah ± 1588 – 1604.
11. Sultan Ali Riayat Syah atau Sultan Muda, anak laki-laki dari nomor 10, 1604 – 1607.
12. Sultan Iskandar Muda, cucu dari nomor 10. 1607 – 1636.
13. Sultan Iskandar Thani 1636 – 1641 anak laki-laki dari Sultan Ahmad dari Pahang, menantu dari nomor 12.
14. Sultanah Tadj al Alam Syafiatuddin Syah atau putri Sri Alam Permaisuri, 1641 – 1675.
15. Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah, 1675 – 1678.
16. Sultanah Inayat Syah atau Putri Raja Setia, 1678 – 1688.
17. Sultanah Kamalat Syah, 1688 – 1699.
18. Sultan Badrul Alam Syarif Hasjim Djamaluddin, 1699 – 1702.
20. Sultan Djamal al Alam Badr al Munir, 1703 – 1726, anak laki-laki nomor 18.
21. Sultan Djuhar Alam, Maharaja dari kampung Pahang dan meninggal 20 hari setelah dia dinobatkan menjadi Sultan
22. Sultan Syamsul Alam, atau Wandu Tebing. Ia menjadi Sultan hanya beberapa hari.
23. Sultan Alaudin Ahmad Syah atau Maharaja Lela Melayu, 1727 – 1735.
24. Sultan Alauddin Johan Syah atau Pocut Auk, 1735 – 1760. Anak laki-laki dari nomor 23.
25. Sultan Mahmud Syah atau Tuanku Radja, 1760 – 1781 anak laki-laki dari nomor 24.
26. Sultan Alaudin Muhammad Syah atau Tuanku Muhammad, 1781 – 1795, anak laki-laki dari nomor 25.
27. Sultan Alaudin Jauhar Alam Syah, 1795 – 1824, anak laki-laki dari nomor 26, belum dewasa masih di bawah pengawasan ibunya dan pamannya dari pihak ibu, baru dalam 1802 memegang pemerintahan sendiri.
28. Sultan Muhammad Syah, juga dinamakan Sultan Buyung, 1824 – 1836 anak laki-laki dari nomor 27.
29. Sultan Sulaiman, ± 1836 – 1857, anak dari nomor 28.
30. Sultan Ali Alaudin Mansur Syah (Ibrahim) 1857 – 1970, anak laki-laki dari nomor 27.
31. Sultan Mahmud Syah 1870 – 1874. anak laki-laki dari nomor 29.
32. Sultan Muhammad Daud Syah, 1874 – 1903, cucu dari nomor 30.

Sumber : R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critische Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevens over de Geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh" *BKI* 65 (1911), hal. 213–215. Dan Anthony Reid, *The Contest for North Sumatera, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858 – 1898*, (Kuala Lumpur - Singapore : Oxford University Press, University of Malaya Press. 1969) hal. 290.

LAMPIRAN V

Isi Perjanjian Persahabatan Antara Aceh dengan Belanda 30 Maret 1857.

Pasal 1. Mulai saat ini terdjadilah perdamaian sedjati, persahabatan dan hubungan akrab antara gubernemen Hindia Belanda dengan sri sultan Atjeh dan keturunannja serta pengikutnja.

Pasal 2. Bilamana rakjat gubernemen Hindia Belanda atau rakjat sri sultan Atjeh ingin tunduk dibawah undang² negeri lainnja maka mereka itu dapat sadja melakukan demikian, berpindah dimana sadja untuk mendapatkan keinginan mereka jang halal baik didaerah gubernemen Hindia Belanda maupun didaerah sultan, dan mereka boleh mlawat atau tinggal disana, memiliki hak, keuntungan dan perlindungan diri sendiri dan harta bendanja seperti jang sudah atau jang akan diberikan kepada rakjat dan keturunan negara² dibawah angin jang paling mendapat keuntungan.

Pasal 3. Berkenaan dengan perlindungan dan bantuan, djuga terhadap kapal² dan perahu dan apapun djuga pengangkutan lautnja dan berkenaan dengan hak berdagang dan perkapalan, maka rakjat gubernemen Hindia Belanda dan sultan Atjeh disamakan dengan bangsa sahabat², jang lebih beruntung, dalam segala pelabuhan-pelabuhan baik digubernemen Hindia Belanda maupun diwilajah sultan Atjeh.

Segala kepala dan pegawai dari pelabuhan dan bandar² akan mendapat tugas dengan se-baik²nja dan sedapat mungkin memberi bantuannya kepada rakjat jang bersangkutan, kepada kapal dan perahunja, terutama supaja rakjat itu djangan terhalang daripada mengantarkan dan miembongkar segala barang² dagang jang diangkutnja demikian djuga atas segala bantuan dan perbekalan atau air jang diperlukannja.

Berkenaan dengan ini adalah sesuai dengan tudjuan untuk membangkitkan dagang, perkapalan dan kebolehan antara rakjat kedua pihak.

Pasal 4. Gubernemen Hindia Belanda dan sri sultan Atjeh melepaskan segala tuntutanja dan claimnja jang tumbuh sebelum perdjandjian ini atas segala pertikaian baik dengan djalan apapun.

Pasal 5. Seterusnja gubernemen Hindia Belanda dan sri sultan telah semufakat untuk mentjegah sekeras²nja dengan djalan apapun jang ada padanja supaja tidak ada lagi kesempatan melakukan pembadjakan dan pembunuhan manusia didaerah masing² jang dikuasai mereka.

Pasal 6. Kedua belah pihak berdjandji akan memberikan bantuan kepada kapal² dari masing² pihak jang terdampar.

Pasal 7. Kedua belah pihak telah memahami dengan baik bahwa untuk memudahkan perhubungan antara keduannya, gubernur djenderal Hindia Belanda, diwakili oleh gubernur Sumatera Barat.

Pasal 8. Djika tumbuh barang sesuatu jang hendak diselesaikan terhadap sesuatu salah paham, maka kedua belah pihak bersetudju untuk menjelesaikan dengan djalan damai.

Pasal 10. Perdjandjian ini berlaku pada waktu dia disjahkan oleh gubernur djenderal di Betawi.

lul 3, 3 (lul 2)

Sumber : Muhammad Said, 1961. *Aceh Sepanjang Abad*, Medan, Penerbit dan pengarang sendiri, hal 271 - 296.

